



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DJKN
KANWIL ACEH

www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-aceh

LAPORAN KINERJA

2022

Kantor Wilayah DJKN Aceh

 @kanwildjknaceh

 @kanwildjknaceh

 DJKN Aceh



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, atas kuasanya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Aceh telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2022. Hal ini merupakan wujud pertanggungjawaban keberhasilan kinerja Kanwil DJKN Aceh atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah diberikan kepada Kanwil DJKN Aceh selama tahun 2022.

Laporan Kinerja disusun sebagai implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 dilakukan berdasarkan hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan kontrak kinerja Kanwil DJKN Aceh. Sebagaimana penetapan IKU Kemenkeu *Two* pada Kanwil DJKN Aceh Tahun 2022, maka rata-rata capaian IKU Kanwil DJKN Aceh Tahun 2022 (Nilai Kinerja Organisasi) adalah sebesar 114,48% dari 12 Sasaran Strategis (SS) dengan total 20 IKU. NKO Tahun 2022 mengalami pertumbuhan positif dibandingkan dengan Tahun 2021 (112,26%). Hal tersebut menandakan upaya luar biasa dari Kanwil DJKN Aceh dalam mencapai target dan upaya perbaikan terus menerus demi menuju kesempurnaan sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan.

Laporan Kinerja Tahun 2022 merupakan media pertanggungjawaban atas mandat dan capaian kinerja yang telah ditetapkan, serta menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan umpan balik bagi langkah perbaikan di masa mendatang.

Banda Aceh, Februari 2023
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Syukriah HG



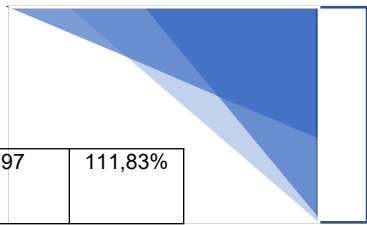


RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyelenggaraan *good governance* dilaksanakan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), perlu diterapkannya prinsip-prinsip pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang terdiri dari prinsip/asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Berdasarkan evaluasi kinerja Tahun 2022, secara keseluruhan kinerja Kanwil DJKN Aceh yang terdiri 12 Sasaran Strategis (SS) dengan 20 IKU, sudah memenuhi ekspektasi (berstatus hijau). Nilai Kinerja Organisasi (NKO) adalah sebesar 114,48%, terjadi peningkatan dari NKO tahun lalu (112,26%). Pencapaian target dan realisasi IKU tahun 2022 secara ringkas, yaitu:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	170,12%	120%
		Persentase produktivitas lelang	36%	56,33%	120%
		Tingkat keberhasilan joint program pelaksanaan RCE dan pengembangan UMKM	80	100	120%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	220,15%	120%
		Persentase Penurunan outstanding Piutang Negara	100%	180,41%	120%
3.	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	4,55	4,84	106,37%
4.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%	76%	117,32%
		Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	100%	108,55%	108,55%
		Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%	120%	120%
		Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100%	110,35%	110,35%
5.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	19%	0,41%	120%
6.	Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	92%	100,00%	108,70%
		Deviasi Data PNBFP Fungsional DJKN	10%	2,11%	120%
7.	Edukasi yang efektif	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	92	98,10	106,63%
8.	Pengawasan dan pengendalian yang efektif	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%	90,91%	106,95%
9.	SDM yang Kompeten	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120,00%	120,00%
10.	Organisasi yang fit for purpose	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM	85	96,56	113,60%
		Nilai review pengelolaan kinerja	80	95,72	119,65%
11.	Penguatan pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	97,55%	102,16%

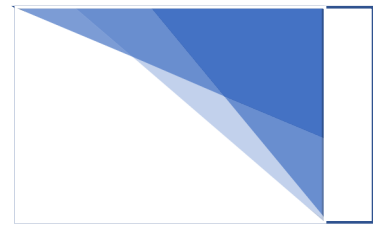


12.	Penguatan Tata Kelola Kehumasan dalam Ekosistem Kolaboratif	Indeks Efektivitas ekosistem kehumasan	3,55	3,97	111,83%
-----	---	--	------	------	---------

Penjabaran terkait Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kanwil DJKN Aceh akan tergambar pada setiap bab dalam Laporan Kinerja ini.

BAB I

PENDAHULUAN



A. Umum

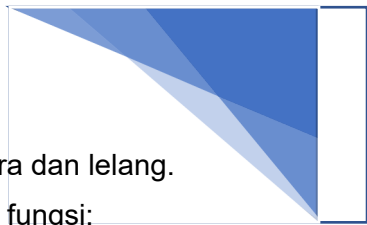
Sebagai salah satu unit di lingkungan Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mempunyai peran strategis dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJKN dituntut untuk melaksanakan dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Asas *good governance* sebagai salah satu azas penyelenggaraan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN).

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Aceh sebagai salah satu instansi vertikal yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara juga bertanggungjawab menyusun LAKIN Tahun 2022 sebagai pertanggungjawaban Kanwil DJKN Aceh dalam pencapaian tujuan/sasaran strategis organisasi. Berikut ini gambaran umum dari Kanwil DJKN Aceh sebagai instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang meliputi tugas pokok dan fungsi organisasi, struktur organisasi dan peran strategis Kanwil DJKN Aceh.

B. Tugas dan Fungsi

Kantor Wilayah DJKN Aceh merupakan instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Adapun tugas dan fungsi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN adalah melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, supervisi, pengendalian,



evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Kanwil DJKN menyelenggarakan fungsi:

1. pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang kekayaan negara;
2. pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
3. pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi atas penatausahaan, penagihan, dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
4. pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian;
5. pemberian bimbingan teknis, penggalan potensi, pemantauan, evaluasi, dan verifikasi lelang serta pengembangan lelang;
6. pemberian pelayanan advokasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
7. pemberian bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan pelayanan informasi serta pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang;
8. pembinaan terhadap Penilai, Jasa Lelang, dan Profesi Lelang;
9. penyiapan bahan bimbingan dan evaluasi kepatuhan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa;
10. pelaksanaan pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, penilaian, dan lelang;
11. pelaksanaan penilaian dan pengurusan piutang negara; dan
12. pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala Kanwil DJKN Aceh senantiasa berpegang teguh pada visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yaitu:

“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara Yang Profesional Dan Akuntabel Dalam Rangka Mendukung Visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara Untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia Yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, Serta Untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat di Lingkungan Kanwil DJKN Aceh”

C. Struktur Organisasi Kanwil DJKN Aceh

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154 /PMK.01/2021 tentang Organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan, Kanwil DJKN Aceh memiliki 2 (dua) kantor operasional yang aktif, yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh dan KPKNL Lhokseumawe. Selain memiliki



kantor operasional, struktur organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh terdiri dari:

1. Bagian Umum;
2. Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara;
3. Bidang Penilaian;
4. Bidang Piutang Negara;
5. Bidang Lelang;
6. Bidang Kepatuhan Internal Hukum dan Informasi;
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.1
Bagan Organisasi Kantor Wilayah Ditjen Kekayaan Negara



Wilayah kerja Kanwil DJKN Aceh meliputi seluruh wilayah Propinsi Aceh yang terdiri dari 23 Kabupaten/Kota yang terbagi dalam wilayah kerja KPKNL Banda Aceh dan KPKNL Lhokseumawe. Adapun peta wilayah kerja Kanwil DJKN Aceh adalah sebagai berikut:

Gambar 1.2
Peta Wilayah Propinsi Aceh





Wilayah kerja KPKNL Banda Aceh, meliputi:

1. Kota Banda Aceh
2. Kota Sabang
3. Kab. Pidie
4. Kab. Pidie Jaya
5. Kab. Aceh Besar
6. Kab. Aceh Barat
7. Kab. Aceh Selatan
8. Kab. Aceh Singkil
9. Kab. Aceh Jaya
10. Kab. Aceh Barat Daya
11. Kab. Simeulue
12. Kota Subulussalam
13. Kabupaten Nagan Raya

Wilayah kerja KPKNL Lhokseumawe, meliputi:

1. Kota Lhokseumawe
2. Kab. Aceh Utara
3. Kab. Aceh Tengah
4. Kab. Aceh Timur
5. Kab. Aceh Tamiang
6. Kab. Aceh Tenggara
7. Kab. Bireuen
8. Kota Langsa
9. Kab. Bener Meriah
10. Kab. Gayo Lues

Kanwil DJKN Aceh didukung oleh 36 orang pegawai dari berbagai bidang keahlian seperti ekonomi, akuntansi, manajemen, hukum, dan lainnya. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat jabatan, golongan, pendidikan, dan gender adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Kanwil DJKN Aceh Berdasarkan Jabatan dan Golongan

No	Jabatan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Pelaksana	-	8	10	-	18
2	Fungsional	-	-	1	-	1
2	Eselon IV	-	-	11	-	11
3	Eselon III	-	-	-	5	5
4	Eselon II	-	-	-	1	1
Jumlah		-	8	22	6	36



Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Kanwil DJKN Aceh Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	SLTP	-	-	-	-	-
2	MAN/SMA/SLTA/KPAA	-	-	3	-	3
4	D1	-	2	-	-	2
5	D3	-	6	-	-	6
6	D4/S1	-	-	16	-	16
7	S2	-	-	2	5	7
8	S3	-	-	1	1	2
Jumlah		-	8	22	6	36

Tabel 1.3
Komposisi Pegawai Kanwil DJKN Aceh Berdasarkan Gender

No	Gender	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Laki-laki	-	3	17	5	25
2	Perempuan	-	5	5	1	11
Jumlah		-	8	22	6	36

Tabel 1.4
Komposisi Pegawai Kanwil DJKN Aceh Berdasarkan Kelompok Umur dan Golongan

No	Kelompok Umur	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	18 – 30 tahun	-	7	4	-	11
2	31 – 40 tahun	-	1	8	1	10
4	41 – 50 tahun	-	-	6	3	9
5	di atas 50 tahun	-	-	4	2	6
Jumlah		-	8	22	6	36

Tabel 1.5
Komposisi Tenaga Fungsional Pada Kanwil DJKN Aceh

No	Jabatan Fungsional	Jumlah
1	Juru Sita	3
2	Pejabat Fungsional Pelelang	-

4	Pejabat Fungsional Penilai	1
5	Pemeriksa	3
Jumlah		7

D. Isu Strategis

- a. Percepatan sertifikasi BMN berupa tanah Tahun 2022 di Lingkup Kantor Wilayah DJKN Aceh sebanyak 3.940 bidang. Realisasi sampai Q4 pensertipikatan BMN berupa tanah mencapai 4.277 bidang, capaian tersebut melebihi dari bidang tanah yang telah ditargetkan di tahun 2022.
- b. Pencapaian pokok lelang dari target Rp. 79.000.000.000,00 dengan realisasi Rp. 173.920.353.677,00. Hal tersebut mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi dari pokok lelang yang ditargetkan, meskipun dengan penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Provinsi Aceh yang secara aktif telah dilaksanakan.
- c. *Crash Program* sesuai dengan undang-undang APBN tahun 2022 yang mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

E. Sistematika Laporan

1. Ikhtisar Eksekutif

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta langkah antisipatifnya

2. Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

3. Bab II. Perencanaan Kinerja


Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2022.

4. Bab III. Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

- 
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan tahun 2022;
 - 3) Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
 - 4) Menganalisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 - 5) Menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
 - 6) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi yang telah diupload ke aplikasi e-sakip).
 - 7) Rencana aksi ke depan.

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Kanwil DJKN Aceh sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

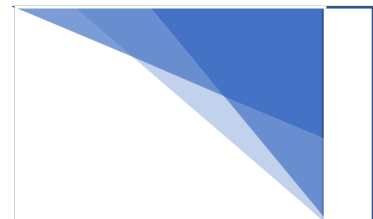
5. Bab IV. Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Kanwil DJKN Aceh serta langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja pada tahun 2022.

6. Lampiran

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II PERENCANAAN KINERJA



A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020 – 2024 ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020 tanggal 29 Agustus 2020 memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis dan digunakan untuk mengantisipasi kondisi masa depan sehingga dapat mencapai target yang diinginkan. Kantor Wilayah DJKN Aceh memiliki visi yang sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk tahun 2020-2024 yaitu

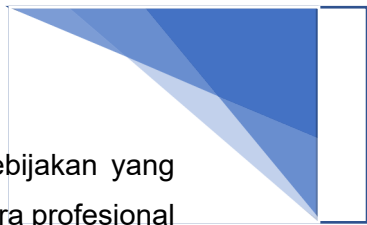
'Menjadi Pengelola Kekayaan Negara Yang Profesional Dan Akuntabel Dalam Rangka Mendukung Visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara Untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia Yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, Serta Untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat di Lingkungan Kanwil DJKN Aceh'.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka Kanwil DJKN Aceh menetapkan misi seperti yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yaitu:

- 1.1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
- 1.2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
- 1.3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
- 1.4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
- 1.5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Penjabaran atas misi tersebut ditetapkan dalam suatu bentuk tujuan yang memiliki korelasi dengan misi yang telah dinyatakan sebelumnya. Tujuan Kanwil DJKN Aceh sebagaimana tujuan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
- b. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
- c. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
- d. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien;



Dalam kurun waktu 2020-2024, Kanwil DJKN Aceh mempunyai arah kebijakan yang dapat mendorong peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara secara profesional dan akuntabel demi terwujudnya visi dan misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Arah kebijakan dan strategi Kanwil DJKN Aceh tahun 2020-2024 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Kekayaan Negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial

Kondisi yang ingin dicapai dalam Pengelolaan Kekayaan Negara yang lebih efisien dan efektif dan optimal serta pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya.

Adapun strategi yang untuk mewujudkannya adalah :

- a. Rekonsiliasi dan pemutakhiran data piutang negara seluruh K/L;
- b. Optimalisasi pengelolaan piutang negara;
- c. Penguatan regulasi di bidang kekayaan negara melalui penyusunan RUU Pengelolaan Kekayaan Negara;
- d. Penyederhanaan regulasi di bidang Pengelolaan BMN dengan tetap menjaga akuntabilitas.

Adapun strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kondisi pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya adalah:

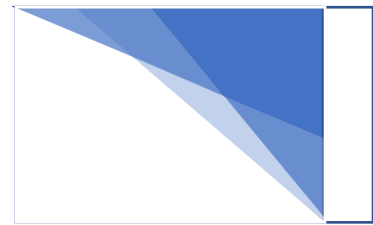
- a. Peningkatan kapasitas SDM, perbaikan bisnis proses dan perangkat analisis Investasi Pemerintah;
- b. *Cross function* unit vertikal DJKN/Kementerian Keuangan (DJP/DJBC/DJPB) dan SMV Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan program kerja SMV.

2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya adalah pengelolaan lelang yang optimal.

Adapun strategi yang dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan lelang yang optimal adalah :

- a. Pelaksanaan *e-Auction* yang mengakomodasi prinsip-prinsip e-commerce baik secara mandiri atau bekerja sama dengan perusahaan *start-up* di bidang *marketplace*.
- b. Pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang lelang dengan kemampuan teknologi informasi yang andal dan modern;



3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien adalah penilaian yang berkualitas.

Adapun strategi yang dilakukan untuk penilaian yang berkualitas antara lain:

- a. Pengembangan sistem informasi penilaian yang terintegrasi dengan instansi terkait secara nasional yang dapat digunakan dalam pengelolaan kekayaan negara;
- b. Peningkatan kompetensi Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah.

4. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien adalah:

- a. Organisasi dan SDM yang optimal;
- b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
- c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah;
- d. Komunikasi publik yang efektif.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai organisasi dan SDM yang optimal adalah:

- a. Restrukturisasi dan penajaman tugas dan fungsi unit kerja DJKN;
- b. Penguatan penyedia tenaga fungsioanl dan professional bersertifikasi;
- c. Pembentukan unit pengelola BMN Hulu Migas.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai sistem informasi yang andal dan terintegrasi adalah:

- a. Transformasi digital manajemen asset dengan mewujudkan IT-Based Service Kekayaan Negara;
- b. Pengembangan pusat data yang integrative dan andal untuk berbagai kepentingan;
- c. Peningkatan kapabilitas tata Kelola TIK DJKN.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah adalah penguatan unit kepatuhan internal di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai komunikasi publik yang efektif adalah peningkatan kapabilitas dan tata Kelola kehumasan.



B. Perjanjian Kinerja

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, telah dirumuskan dalam sasaran strategi Kanwil DJKN Aceh Tahun 2022 yang tertuang dalam bentuk peta strategi Kanwil DJKN Aceh.

Gambar 2.1
Peta Strategi Kanwil DJKN Aceh 2022



Berdasarkan *Strategy Map* Kemenkeu-Two Kanwil Tahun 2022, menerapkan 4 perspektif, 12 Sasaran Strategis (SS) dengan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). Berikut ini merupakan Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kanwil DJKN Aceh beserta target yang telah ditetapkan untuk tahun 2022.

Stakeholder Perspective (25%)

Merupakan perspektif yang berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh stakeholder. Dalam perspektif ini terdapat 1 sasaran strategis, yaitu Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian.

Sasaran Strategis 1: Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian

Sesuai ketentuan dalam Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik



negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang.

Pengelolaan kekayaan negara dapat dikatakan optimal apabila kegiatan pengelolaan BMN, KNL, KND, piutang negara, dan lelang terutilisasi sesuai potensi tertinggi dan terbaiknya, sehingga mampu meningkatkan kontribusi penerimaan negara.

Selain itu, Peningkatan kondisi ekonomi negara disertai pula dengan peningkatan jumlah penerimaan dan belanja negara dalam APBN yang berdampak pada meningkatnya jumlah aset yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Peningkatan aset negara juga didorong oleh kebijakan pembangunan infrastruktur publik yang masif. Oleh karena itu, Tujuan pengelolaan kekayaan negara yang optimal menjadi komitmen dalam kontribusi terhadap kondisi perekonomian negara

Sasaran strategis ini mempunyai 3 Indikator Kinerja Utama, sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel IKU Kanwil DJKN Aceh pada SS.1

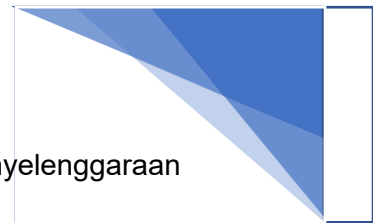
Indikator Kinerja	Satuan	Target
Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Persentase	100
Persentase Produktivitas Lelang	Persentase	36
Tingkat Tingkat keberhasilan joint program pelaksanaan RCE dan pengembangan UMKM	Indeksasi	80

Customer Perspective (15%)

Merupakan perspektif yang berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh customer. Dalam perspektif ini terdapat 2 sasaran strategis, yaitu Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa, dan Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi.

Sasaran Strategis 2: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Pengelolaan Kekayaan Negara dan lelang yang optimal harus mengedepankan sisi implementasi pada pelaksanaan tugas pelayanan terhadap pengguna jasa. Dalam pelaksanaankompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara. Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNBP lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL (JF Pelelang), Pejabat Lelang Kelas II dan Pegadaian, perhitungan



pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang.

Tabel IKU Kanwil DJKN Aceh pada SS.2

Indikator Kinerja	Satuan	Target
Persentase Realisasi Pokok Lelang	%	100
Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	%	100

Sasaran Strategis 3: Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi

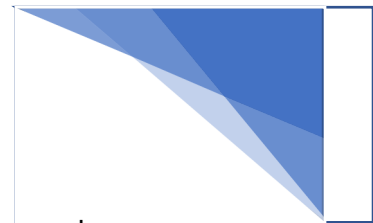
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik.

Pelayanan publik prima ditandai dengan terpenuhinya seluruh aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi standar pelayanan, maklumat pelayanan, system informasi, sarana dan prasarana, biaya/tarif pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja sehingga berdampak pada terwujudnya kepuasan dan terpenuhinya harapan pengguna layanan (*exceeding customer needs*).

Pemenuhan layanan publik diukur berdasarkan hasil survey kepuasan pelanggan oleh Lembaga independen berdasarkan pemenuhan atas asa penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu (a) kepentingan umum; (b) kepastian hukum; (c) kesamaan hak; (d) keseimbangan hak dan kewajiban; (e) keprofesionalan; (f) partisipatif; (g) persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; (h) keterbukaan; (i) akuntabilitas; (j) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; (k) ketepatan waktu; dan (l) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Tabel IKU Kanwil DJKN Aceh pada SS.3

Indikator Kinerja	Satuan	Target
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	Indeks	4,55



Internal Process Perspective (30%)

Berisi proses bisnis seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Adapun sasaran strategis dalam perspektif ini terdiri dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal, Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional, Penerapan tata kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif, Edukasi yang efektif, dan Pengawasan dan pengendalian yang efektif.

Sasaran Strategis 4 : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

Menurut Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang.

Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND. Selain itu, yang termasuk kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang.

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila seluruh BMN, KNL, dan KND telah terutilisasi sesuai potensi tertinggi dan terbaiknya dan pengelolaan BMN, KNL, KND, piutang negara, dan lelang mampu mendorong efektivitas, efisiensi, dan penerimaan negara.

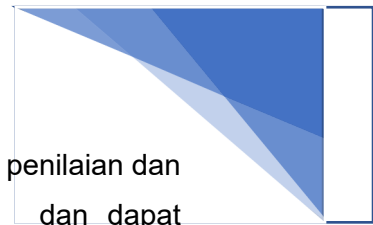
Sasaran strategis ini mempunyai 4 Indikator Kinerja Utama, sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel IKU Kanwil DJKN Aceh pada SS.4

Indikator Kinerja	Satuan	Target
Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	%	65
Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipkatkan	%	100
Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	%	100
Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	%	100

Sasaran Strategis 5 : Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Penilaian yang Akuntabel dan Profesional adalah



penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan di bidang penilaian dan yang berlaku umum, diselesaikan sesuai dengan SOP yang berlaku dan dapat menghasilkan nilai sesuai dengan tujuan penilaian tersebut, serta dapat digunakan oleh pemohon/pengguna jasa dalam mengambil keputusan pengelolaan terkait aset yang dinilai.

Sasaran strategis ini mempunyai 1 Indikator Kinerja Utama, sebagaimana terlihat dalam tabel.

Tabel IKU Kanwil DJKN Aceh pada SS.5

Indikator Kinerja	Satuan	Target
Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	Persentase	19%

Sasaran Strategis 6: Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif

Tata Kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektivitas tercapainya tujuan organisasi. Dalam kaitannya dengan pengelolaan Kekayaan Negara dan Penilaian, kegiatan tata kelola meliputi beberapa kegiatan seperti perencanaan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian. Hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (*good governance*) serta tunduk pada peraturan yang berlaku, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

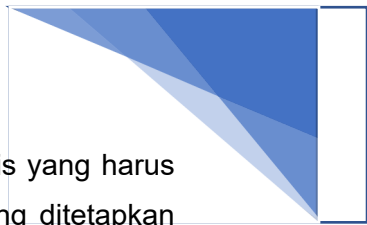
Sasaran strategis ini mempunyai 2 Indikator Kinerja Utama, sebagaimana terlihat dalam tabel.

Tabel IKU Kanwil DJKN Aceh pada SS.6

Indikator Kinerja	Satuan	Target
Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	Persentase	92
Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	Persentase	10

Sasaran Strategis 7: Edukasi yang efektif

Edukasi merupakan kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, pemberian masukan, konsultasi, atau arahan yang dilaksanakan dalam lingkup internal maupun eksternal.



Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman atas proses bisnis yang harus dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal sehingga output yang ditetapkan dalam suatu pekerjaan dapat tercapai. Ruang lingkup edukasi adalah sebagai berikut:

1. Edukasi internal dari atasan/unit superintenden kepada bawahan/unit yang diawasi, dan
2. Edukasi eksternal dari kantor wilayah/KPKNL kepada pengguna layanan/masyarakat umum.

Materi edukasi adalah terkait dengan pengelolaan barang milik negara, kekayaan negara lain-lain, kekayaan negara dipisahkan, pengurusan piutang negara, dan lelang. Edukasi dapat dikatakan efektif apabila pihak yang diedukasi memberikan feedback yang positif atas tingkat pemahaman materi dan proses edukasi yang telah dilakukan.

Sasaran strategis ini mempunyai 1 Indikator Kinerja Utama, sebagaimana terlihat dalam tabel.

Tabel IKU Kanwil DJKN Aceh pada SS.7

Indikator Kinerja	Satuan	Target
Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	Indeks	92

Sasaran Strategis 8: Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

Pengawasan merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rencana semula. Pengendalian dilaksanakan apabila dalam pengawasan ternyata ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan maka segera diambil tindakan koreksi. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dapat efektif apabila dilaksanakan secara terus menerus untuk memastikan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala. Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku. Pengendalian dan pengawasan dapat dikatakan efektif apabila pengawasan dan pengendalian yang dilakukan mampu mendukung tercapainya tujuan organisasi. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada K/L terutama terkait aspek utilisasi.



Pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan BMN dapat dikatakan efektif apabila memenuhi parameter sebagai berikut:

- a. terselesaikannya sengketa/permasalahan pengelolaan BMN yang ada serta menurunnya potensi permasalahan terkait BMN di masa mendatang.
- b. Temuan aparat pemeriksa tuntas ditindaklanjuti.
- c. Tidak ada temuan material/fraud terkait pengelolaan BMN.
- d. Surat persetujuan pengelolaan BMN pada unit pengguna barang ditindaklanjuti.

Sasaran strategis ini mempunyai 1 Indikator Kinerja Utama, sebagaimana terlihat dalam tabel.

Tabel IKU Kanwil DJKN Aceh pada SS.8

Indikator Kinerja	Satuan	Target
Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan Negara	Persentase	85

Learning and Growth Perspective (30%)

Berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan proses bisnis seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Adapun sasaran strategis dalam perspektif ini terdiri dari SDM yang Kompeten, Organisasi yang *Fit For Purpose*, Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal, dan Penguatan Tata Kelola Kehumaan dalam Ekosistem Kolaboratif.

Sasaran Strategis 9: SDM yang Kompeten

SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat, kompetensi teknis yang mumpuni, serta tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi. Upaya untuk mempersiapkan SDM yang berkompentensi tinggi untuk kepentingan jangka panjang dalam rangka memberikan dukungan dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil DJKN.

Untuk mencapai sasaran strategis SDM yang kompetitif, DJKN telah melaksanakan strategi Mengoptimalkan fungsi pengembangan pegawai. Sebagai upaya optimalisasi fungsi pengembangan pegawai, DJKN telah melakukan beberapa inovasi yaitu



pengembangan aplikasi Diklat guna mengidentifikasi kebutuhan, perencanaan, serta evaluasi pelaksanaan diklat yang mendorong kompetensi pegawai.

Sasaran strategis ini mempunyai 1 Indikator Kinerja Utama, sebagaimana terlihat dalam tabel.

Tabel IKU Kanwil DJKN Aceh pada SS.9

Indikator Kinerja	Satuan	Target
Persentase pengembangan kompetensi pegawai	Persentase	100

Sasaran Strategis 10: Organisasi yang Fit For Purpose

Organisasi yang *fit-for-purpose* adalah organisasi yang memiliki desain struktur dan mekanisme kerja (value chain) yang selaras dengan tujuan organisasi.

Organisasi yang kondusif tercermin dengan adanya perilaku anggota organisasi yang memiliki komitmen kuat terhadap organisasi, hubungan yang harmonis di antara setiap anggota organisasi, serta motivasi dan etos kerja yang tinggi. Organisasi kondusif dapat tercipta jika beberapa faktor berikut dapat berjalan dengan baik antara lain pola komunikasi dan hubungan-hubungan dalam interaksi antarpersonal yang mempengaruhi suasana kerja; program pengembangan SDM dan kualitas kerja; alur dan prosedur pelaksanaan kegiatan, model jalur koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan kerja; mekanisme penyampaian pendapat dan tingkat kebebasan dalam menyampaikan pendapat; serta program peningkatan kesejahteraan (termasuk pola jenjang karir). Dengan organisasi yang kondusif, pencapaian tujuan organisasi akan berjalan dengan baik.

Sasaran strategis ini mempunyai 2 Indikator Kinerja Utama, sebagaimana terlihat dalam tabel.

Tabel IKU Kanwil DJKN Aceh pada SS.10

Indikator Kinerja	Satuan	Target
Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBBM	Indeks	85
Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	Indeks	80

Sasaran Strategis 11: Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal

Salah satu sumber daya organisasi sektor publik/pemerintahan adalah Anggaran. Anggaran yang tersedia harus dikelola dengan berkualitas yang ditandai dengan anggaran terserap sesuai rencana yang telah ditetapkan, tercapainya output, efisiensi, konsistensi pelaksanaan anggaran, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan anggaran adalah DIPA. DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja.

Sasaran strategis ini mempunyai 1 Indikator Kinerja Utama, sebagaimana terlihat dalam tabel.

Tabel IKU Kanwil DJKN Aceh pada SS.11

Indikator Kinerja	Satuan	Target
Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	Persentase	95,5

Sasaran Strategis 12: Penguatan Tata Kelola Kehumasan dalam Ekosistem Kolaboratif

Dalam rangka mencapai sasaran strategis peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan kekayaan negara, DJKN telah melaksanakan strategi yaitu peningkatan efektivitas layanan kehumasan. Kehumasan yang efektif diartikan sebagai terlaksananya proses perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi dari kehumasan secara komprehensif sehingga fungsi kehumasan dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Fungsi kehumasan menjadi penting mengingat dengan perkembangan teknologi yang terjadi saat ini stakeholder (sebagai khalayak) dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi yang tersedia, oleh karenanya humas harus mampu memanfaatkan hal tersebut guna memberikan informasi yang andal dan berkualitas. Ruang lingkup dari fungsi kehumasan di DJKN mencakup perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dari penyampaian informasi di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang kepada khalayak.

Sasaran strategis ini mempunyai 1 Indikator Kinerja Utama, sebagaimana terlihat dalam tabel.

Tabel IKU Kanwil DJKN Aceh pada SS. 12

Indikator Kinerja	Satuan	Target
Indeks Efektivitas ekosistem kehumasan	Indeks	3,55



C. Pengukuran Kinerja

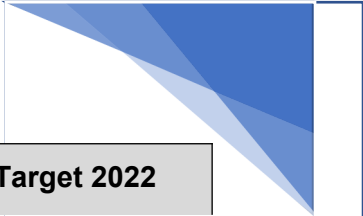
Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja tahun 2022, Kanwil DJKN Aceh berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi maximize semua agar sebanding dengan yang lainnya;
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU;
4. IKU yang ditetapkan, diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target;
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi 120%
 - b. Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.

**Tabel Perjanjian Kinerja Kanwil DJKN Aceh
Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target 2022
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
		1b-CP	Persentase produktivitas lelang	36%
		1c-CP	Tingkat keberhasilan joint program pelaksanaan RCE dan pengembangan UMKM	80%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang	2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%

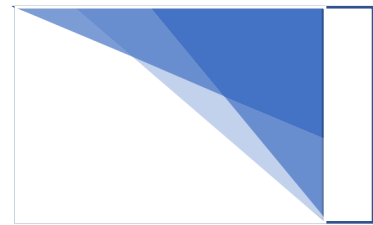
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target 2022
	Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	3a-N	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	4,55
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%
		4b-CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	100%
		4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
		4d-N	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%
6	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif	6a-N	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%
		6b-N	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10%
7	Edukasi yang Efektif	7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	92
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan Negara	85%
9	SDM yang Kompeten	9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
10	Organisasi yang <i>Fit For Purpose</i>	10a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBBM	85
		10b-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	80
11	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target 2022
12	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	12a-N	Indeks Efektivitas ekosistem kehumasan	3,55

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



Pada bab ini akan dijelaskan mengenai capaian kinerja Kanwil DJKN Aceh pada tahun 2022, yang dilengkapi dengan penjelasan/narasi tentang target, realisasi dan evaluasi untuk masing-masing IKU. Kemudian akan diuraikan juga mengenai alokasi dan sumber pembiayaan beserta realisasi anggaran untuk membiayai program yang dijalankan, yang disertai dengan penjelasan mengenai realisasi anggaran.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Kantor Wilayah DJKN Aceh tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kantor Wilayah DJKN Aceh adalah sebesar 112,26%, dengan rincian nilai pada masing-masing perspektif sebagai berikut :

Gambar 3.1
Bagan capaian NKO per perspektif

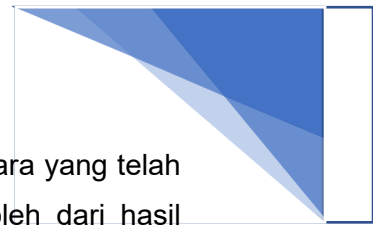
Selama tahun 2022, semua Indikator Kinerja Utama (IKU) Kanwil DJKN Aceh berjumlah 20 IKU. Seluruh IKU tersebut berstatus hijau (sesuai ekspektasi)

Berikut penjelasan dari setiap capaian IKU yang merupakan evaluasi dan analisis kinerja atas 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dicapai Kanwil DJKN Aceh pada tahun 2022 sesuai dengan *Strategy Map* Kemenkeu-*Two* Kanwil DJKN Aceh.

1. (1a-CP) Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Rp20.826.200.000	Rp35.487.400.287	170,12%

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Pasal 28 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang.



Nilai pengelolaan kekayaan negara merupakan nilai penerimaan negara yang telah masuk ke kas negara dan nilai penghematan belanja yang diperoleh dari hasil pengelolaan kekayaan negara.

Nilai penerimaan negara pada lingkup kanwil diperoleh dari:

a. PNBP Barang Milik Negara (PNBP BMN)

- 1) penerimaan dari hasil **pemanfaatan** Barang Milik Negara yang dikelola oleh Kanwil DJKN dan KPKNL serta telah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan.
- 2) penerimaan dari hasil **pemindahtanganan** Barang Milik Negara yang dikelola oleh Kanwil DJKN dan KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan.

b. PNBP Piutang Negara (PNBP PN)

penerimaan dari biaya administrasi pengurusan piutang negara

c. PNBP Lelang (PNBP Lelang)

- 1) bea lelang;
- 2) bea lelang pegadaian;
- 3) denda keterlambatan penyeteroran bea lelang oleh PL Kelas II/Balai Lelang;
- 4) biaya permohonan lelang;
- 5) penerimaan dari uang jaminan pembeli wanprestasi;
- 6) pemberian izin operasional Balai Lelang;
- 7) pengangkatan dan perpanjangan PL Kelas II;
- 8) perolehan kertas sekuriti oleh PL Kelas II, dan
- 9) penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

Berdasarkan komponen tersebut, ruang lingkup capaian pengelolaan kekayaan negara merupakan rekapitulasi dari capaian IKU pada Kanwil DJKN Aceh dan KPKNL Banda Aceh serta KPKNL Lhokseumawe dengan metode konsolidasi raw data adalah sebesar Rp35.487.400.287 dari target sebesar Rp20.826.200.000 atau dalam capaian persentase sebesar 170,12% dengan rincian per masing-masing komponen, sebagai berikut :

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi per komponen capaian Penerimaan dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Tahun 2022

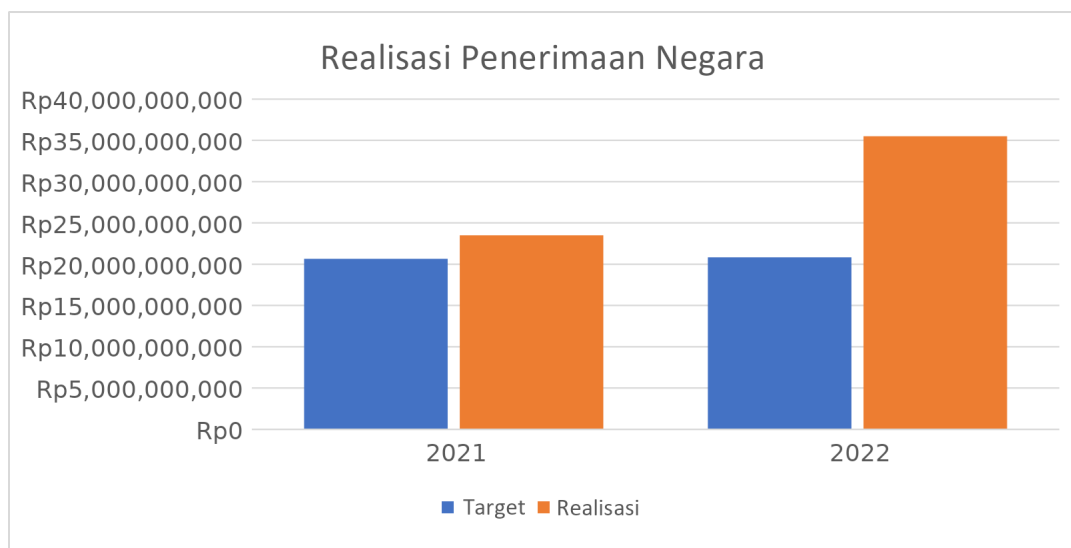
Jenis Capaian	Target	Realisasi
Capaian PNBP BMN	Rp18.000.000.000	Rp20.516.671.913
Capaian PNBP PN	Rp50.200.000	Rp54.820.711



3. Melakukan koordinasi ke KPKNL Banda Aceh dan KPKNL Lhokseumawe

Rekomendasi rencana Aksi:

1. Melakukan koordinasi dengan KPKNL dan satker untuk melakukan optimalisasi pengelolaan BMN
2. Melakukan bimbingan/asistensi ke KPKNL dalam rangka penggalan potensi piutang negara
3. Melakukan koordinasi dengan KPKNL untuk mengelola pelayanan lelang



2. (1b-CP) Persentase Produktivitas Lelang

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase Produktivitas Lelang	34%	56,33%	120,00%

Dalam rangka mengukur ketercapaian sasaran strategi ini, digunakan indikator persentase produktivitas hasil lelang yang diperoleh dari realisasi jumlah frekuensi lelang laku secara keseluruhan serta frekuensi lelang laku secara keseluruhan baik lelang sukarela atau perorangan dengan nilai dibawah atau sama dengan Rp500.000,00. Adapun persentase ini merupakan jumlah total pada instansi vertical Kanwil DJKN Aceh yakni KPKNL Banda Aceh dan KPKNL Lhokseumawe.

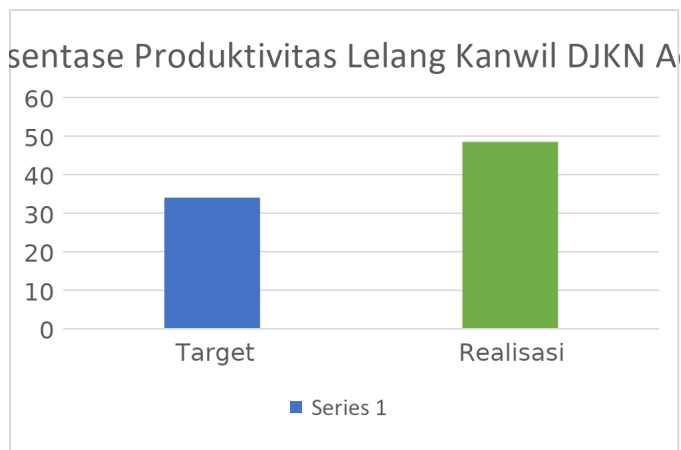
Kanwil DJKN Aceh selaku Pembina atau superintendent lelang bagi KPKNL Banda Aceh dan Lhokseumawe memberikan supervise dengan melakukan Sosialisasi dan konsultasi secara aktif dengan masing-masing satuan kerja dan stakholder terkait

permohonan lelang serta melakukan penggalan potensi lelang kepada stakeholder/pemohon lelang.



Tabel Simulasi Progress Capaian IKU

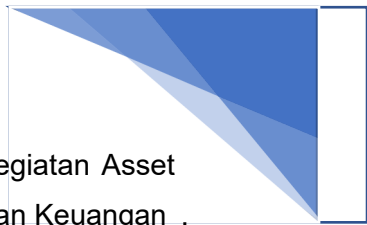
(1)	(2)	(3)	(4)	Target 2022		Q1	Q2	Semester 1	Q3	s. d. Q3	s. d. Desember 2022	2022
				Target Awal Tahun 2022	Target Adendum							
				(5)	(6)							
1b-CP	FM		Persentase produktivitas lelang	MAK/TLK								
		a	Jumlah Frekuensi Lelang Laku Secara keseluruhan			71	86	156	272	272	369	368
			Kanwil DJKN Aceh			0	0	0	1	100	1	1
			KPRNL Banda Aceh			50	104	104	169	169.000	230	
			KPRNL Lhokseumawe			21	52	52	102	102.000	135	135
			Jumlah Frekuensi lelang secara keseluruhan			101	274	274	488	488	759	758
			Kanwil DJKN Aceh			0	0	1	1	100	1	1
			KPRNL Banda Aceh			70	165	165	304	304.000	467	467
			KPRNL Lhokseumawe			51	109	109	184	184.000	290	290
			% Lelang laku keseluruhan			98,68%	56,93%	56,93%	54,51%	54,51%	48,28%	48,28%
		b	Jumlah Frekuensi Lelang Laku Sukarela atau perorangan dengan nilai dibawah atau sama dengan Rp500.000			2	4	4	2	2	2	2
			Kanwil DJKN Aceh			0	0	0	0	0	0	0
			KPRNL Banda Aceh			2	2	2	2	2	2	2
			KPRNL Lhokseumawe			0	2	2	0	2	0	2
			Jumlah Frekuensi Lelang Sukarela atau perorangan dengan nilai dibawah atau sama dengan Rp500.000			2	4	4	2	2	2	2
			Kanwil DJKN Aceh			0	0	0	0	0	0	0
			KPRNL Banda Aceh			2	2	2	2	2	2	2
			KPRNL Lhokseumawe			0	2	2	0	2	0	2
			% Lelang laku sukarela nilai <=500.000			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Jumlah Target realisasi produktivitas lelang	94%		57,98%	56,30%	56,30%	54,33%	54,33%	48,15%	48,15%
			Capaian IKU	-		57,98%	56,30%	56,30%	54,33%	54,33%	48,15%	48,15%



3. (1c-N) Tingkat Keberhasilan Joint Program Pelaksanaan RCE dan Pengembangan UMKM

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Tingkat keberhasilan joint program pelaksanaan RCE dan pengembangan UMKM	80%	100%	120,00%

DJKN sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, memiliki peran yang sangat strategis dan kontributif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah, melalui program Regional Chief Economist (RCE) dan pengembangan ekonomi UMKM melalui platform lelang.go.id. RCE DJKN pada Regional cakupan wilayah Kanwil DJKN Aceh sesuai



dengan tugas dan fungsinya memberikan kontribusinya seperti melalui kegiatan Asset Liabilities Committee (ALCo) dan Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan .

Peran strategis Kanwil DJKN Aceh dalam Program ALCo yakni dengan meningkatkan sinergi pertukaran data dan informasi antar unit eselon I Kementerian Keuangan yang ada di Propinsi Aceh, menyajikan data yang akurat terkait pelaksanaan APBN baik dari sisi penerimaan pajak, bea dan cukai, data PNPB pengelolaan aset maupun dari sisi belanja dan pengeluaran pemerintah, dan menyampaikan laporan kepada Menteri Keuangan terkait pelaksanaan ALCo Regional Aceh. Selain itu juga melakukan rapat koordinasi terkait ALCo dengan unit eselon I Kementerian Keuangan yang ada di Propinsi Aceh secara bulanan dan menyampaikan Laporan ALCo Periode Januari s.d. Juni 2022 kepada Menteri Keuangan oleh Kanwil DJPb Provinsi Aceh sebagai RCE di wilayah Aceh. Guna mengakselerasi dan mengkolaborasikan peran DJKN dan mandat SMV untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Aceh, Kanwil DJKN Aceh berinisiatif membentuk Pojok SMV, dengan mengenalkan enam SMV yang berada di bawah pembinaan DJKN, guna lebih mendekatkan peran SMV tersebut dengan pemangku kepentingan di Provinsi Aceh dalam rangka bersinergi membangun Provinsi Aceh yang lebih baik lagi kedepannya.

Maksud dan tujuan pembentukan Pojok SMV adalah:

- a) Mendorong peran Kanwil DJKN Aceh untuk memberikan edukasi dan sosialisasi yang efektif dalam rangka mengenalkan SMV Kementerian Keuangan bagi para pemangku kepentingan di Provinsi Aceh;
- b) Menjadikan Kanwil DJKN Aceh sebagai penghubung utama antara SMV Kementerian Keuangan dan para pemangku kepentingan di Provinsi Aceh dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Aceh;
- c) Menjadikan Kanwil DJKN Aceh sebagai pusat informasi pengembangan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di Provinsi Aceh;
- d) Mendorong peran SMV Kementerian Keuangan untuk mengimplementasikan program-program kerja yang dapat dikolaborasikan dengan program kerja para pemangku kepentingan di Provinsi Aceh guna mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Aceh

Untuk mengefektivkan pelaksanaan pojok SMV, Kanwil DJKN Aceh melakukan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pojok SMV yang dilakukan secara Triwulanan yang dilaksanakan oleh Tim Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pemberdayaan Ekonomi Serta Kesejahteraan Masyarakat Aceh.

Dalam rangka pengembangan UMKM, Kanwil DJKN Aceh membantu perekonomian bagi UMKM dengan memasarkan produknya melalui lelang.go.id dan mengikutsertakan UMKM dalam program CPNE yang diselenggarakan oleh LPEI sehingga pada akhirnya menjadi eksportir yang mahir dan berkontribusi dalam meningkatkan komoditi ekspor di Indonesia. Bersinergi dengan LPEI melaksanakan Coaching Program For New Exporter dan melakukan peninjauan desa devisa di Bener Meriah. Adapun Program CPNE selanjutnya akan dilaksanakan secara gabungan antara pemula dan expert dan akan dilakukan kajian dan pendampingan terkait pembentukan desa devisa dengan mendirikan koperasi di desa terpilih, mengingat pada dasarnya banyak UMKM yang ingin mengikuti program CPNE.

Tabel Simulasi Progress Capaian IKU

(1)	(2)	(3)	(4)	Target 2022		Q1	Q2	Semester 1	Q3	s. d. Q3	s. d. Desember 2022	2022
				Target Awal Tahun 2022	Target Adendum							
				(5)	(6)							
ic-N	PM		Tingkat keberhasilan joint program pelaksanaan RCE dan pengemb	MAWTLK								
			Kanwil DJKN Aceh								100,00	
			Jumlah Target/Realisasi Tingkat keberhasilan joint program pelaksanaan RCE dan pengembangan UMKM	80%							100,00	100,0
			Capaian IKU								100,00	100,0

4. (2a-CP) Persentase Realisasi Pokok Lelang

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	220,15%	120,00%

Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

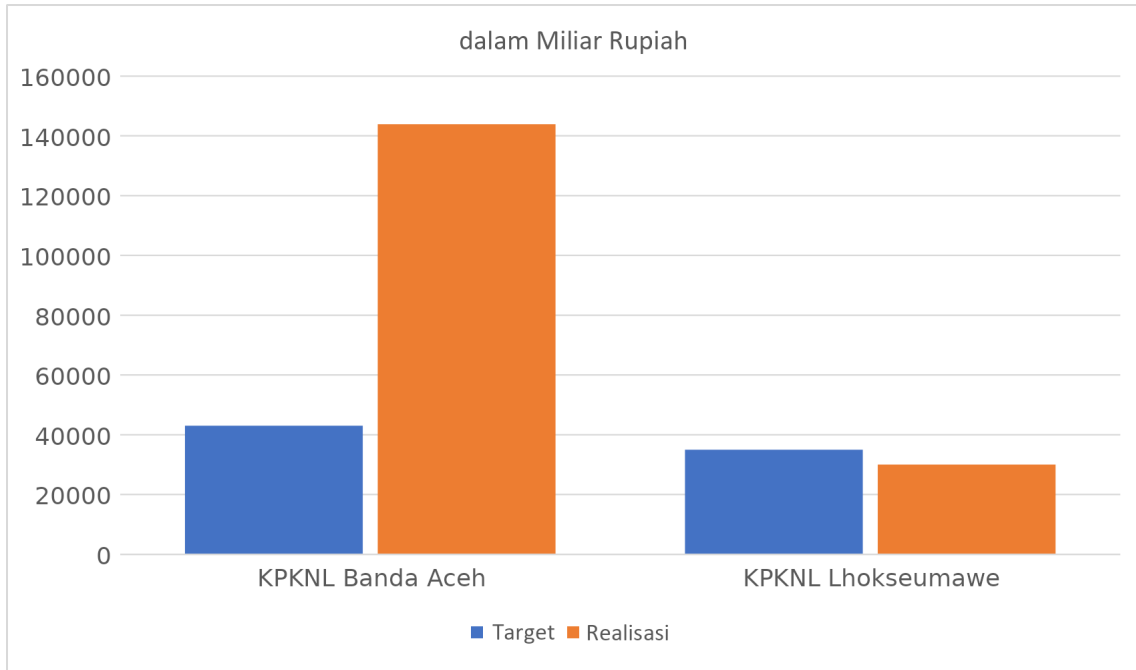
Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I, Pejabat Lelang (PL) Kelas II dan Pegadaian dalam periode tertentu. Target jumlah pokok lelang pada Kanwil DJKN Aceh tahun 2022 adalah sebesar Rp79.000.000.000,00 dengan distribusi target sebagai berikut:

1. KPKNL Banda Aceh Rp43.000.000.000,00

2. KPKNL Lhokseumawe Rp35.000.000.000,00

Adapun Realisasi Pokok Lelang Tahun 2022 Kanwil DJKN Aceh secara keseluruhan mencapai Rp173.920.353.677,00 dengan capaian IKU sebesar 220,15%.

Realisasi Pokok Lelang Tahun 2022 dapat dilihat sebagaimana terlampir.

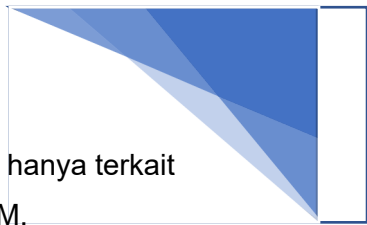


Tabel Simulasi Progress Capaian IKU

(1)	(2)	(3)	Target 2022		Q1	Q2	Semester 1	Q3	s. d. Q3	s. d. Desember 2022	2022
			Target Awal Tahun 2022	Target Adendum							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2a	CP	FM	Persentase Realisasi Pokok Lelang	Rp 79.000.000.000	Rp14.283.598.693	Rp 30.619.766.580	Rp 30.619.766.580	Rp 150.098.313.954	Rp 150.098.313.954	Rp 173.920.353.677	Rp 173.920.353.677
			Kanwil DJKN Aceh	Rp1.000.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 37.999.999	Rp 37.999.999	Rp 37.999.999	Rp 37.999.999
			KPKNL Banda Aceh	Rp43.000.000.000,00	Rp 9.141.236.954	Rp18.989.156.694,00	Rp 18.989.156.694	Rp 131.474.950.002	Rp 131.474.950.002	Rp 143.886.172.338	Rp 143.886.172.338
			KPKNL Lhokseumawe	Rp35.000.000.000,00	Rp 5.142.362.139	Rp11.630.609.886,00	Rp 11.630.609.886	Rp 18.596.363.953	Rp 18.596.363.953	Rp 29.996.181.340	Rp 29.996.181.340
			Capaian IKU		18,08%	38,76%	38,76%	190,00%	190,00%	220,15%	220,15%

Tahun 2022 Lelang kanwil DJKN Aceh menghadapi tantangan yang sangat berat, baik dari sisi penjual (pemohon lelang) maupun dari sisi pembeli (peserta lelang). Dari sisi penjual, perbankan di Provinsi Aceh selaku pemohon Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) sedang dalam proses untuk melaksanakan 2 konversi, yaitu:

1. Konversi Perbankan di Provinsi Aceh dari sistem konvensional ke sistem syariah. Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah mengamanatkan bahwa semua lembaga keuangan yang beroperasi di Propinsi Aceh wajib menerapkan prinsip keuangan syariah, selambat-lambatnya 3 tahun



sejak Qanun diundangkan. Proses konversi ini pada praktiknya tidak hanya terkait sistem namun juga mencakup perjanjian kredit, debitur, maupun SDM.

2. Merger Bank BUMN Syariah. Sesuai dengan program menteri BUMN untuk melakukan penyederhanaan jumlah BUMN maupun anak perusahaan yang sejenis, demikian juga dengan Bank Syariah yang proses mergernya dimulai diakhir tahun 2020. Dalam proses merger ini BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri (BSM), BNI Syariah, dan BTN Syariah bergabung menjadi satu yaitu Bank Syariah Indonesia

Dua proses konversi ini menyedot energi yang besar dipihak perbankan sehingga terjadi penurunan permohonan lelang karena perbankan focus dengan administrasi.

Selain itu, terdapat kendala yang ditemukan di lapangan yaitu seperti rendahnya daya laku Objek Lelang yang salah satunya disebabkan adanya gugatan² terhadap proses lelang sehingga menurunkan minat calon pembeli lelang dan belum adanya Objek Lelang yang potensial yang memiliki nilai jual maupun nilai pasar yang significant sehingga mampu mendorong capaian PNBPN.

Lebih lanjut, Kanwil DJKN Aceh selaku Pembina maupun superintendent mengambil beberapa langkah diantaranya seperti melakukan monitoring dan evaluasi berkala (per bulan) secara virtual melalui Aplikasi Zoom, melakukan koordinasi dan penggalian potensi lelang ke stakeholder/ pemohon lelang, mendorong KPKNL dan Pejabat Lelang Kelas II untuk menggiatkan Lelang Noneksekusi Sukarela khususnya produk-produk UMKM sekaligus dapat dijadikan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat umum tentang keunggulan membeli barang melalui Lelang.

Bidang Lelang Kanwil DJKN Aceh, dengan menggandeng KPKNL Banda Aceh dan Lhokseumawe, telah mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan berbagai perbankanterkait selaku pemohon lelang secara daring.

Bidang Lelang Kanwil DJKN Aceh telah melaksanakan kordinasi dan penggalian potensi Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara (BMN) pada Satker tingkat Propinsi diantaranya Pemprov Aceh, Polda Aceh, Kejati Aceh, Kanwil Kemenag, Kanwil BPN, dan Kanwil Kemenkumham.

5. (2b-CP) Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	180,41%	120%

IKU Tingkat Penurunan Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari penagihan piutang negara. Tingkat Penurunan Outstanding Piutang Negara diperoleh dari penurunan outstanding piutang negara yang diurus oleh KPKNL Banda Aceh dan KPKNL Lhokseumawe.

Selain itu, sejalan dengan pemulihan ekonomi pada Undang-Undang APBN 2022. Crash program melalui PMK No.11/PMK.06/2022 diterapkan, ini merupakan skema baru dan telah dilakukan penyesuaian dari sistem sebelumnya. Kantor Wilayah DJKN Aceh beserta KPKNL Banda Aceh dan KPKNL Lhoskeumawe sebagai unit vertikal DJKN dalam mendukung Crash Program, senantiasa melakukan optimalisasi pengelolaan piutang negara dengan memberikan informasi, sosialisasi, dan pemetaan terhadap debitur yang memenuhi kategori obyek crash program dengan kriteria yaitu Penanggung Utang yang masuk kategori UMKM dengan pagu kredit paling banyak Rp5.000.000.000,00, penerima KPR-RS/RSS dengan pagu kredit paling banyak Rp100.000.000,00, dan Penanggung Utang dengan sisa kewajiban paling banyak Rp1000.000.000,00.

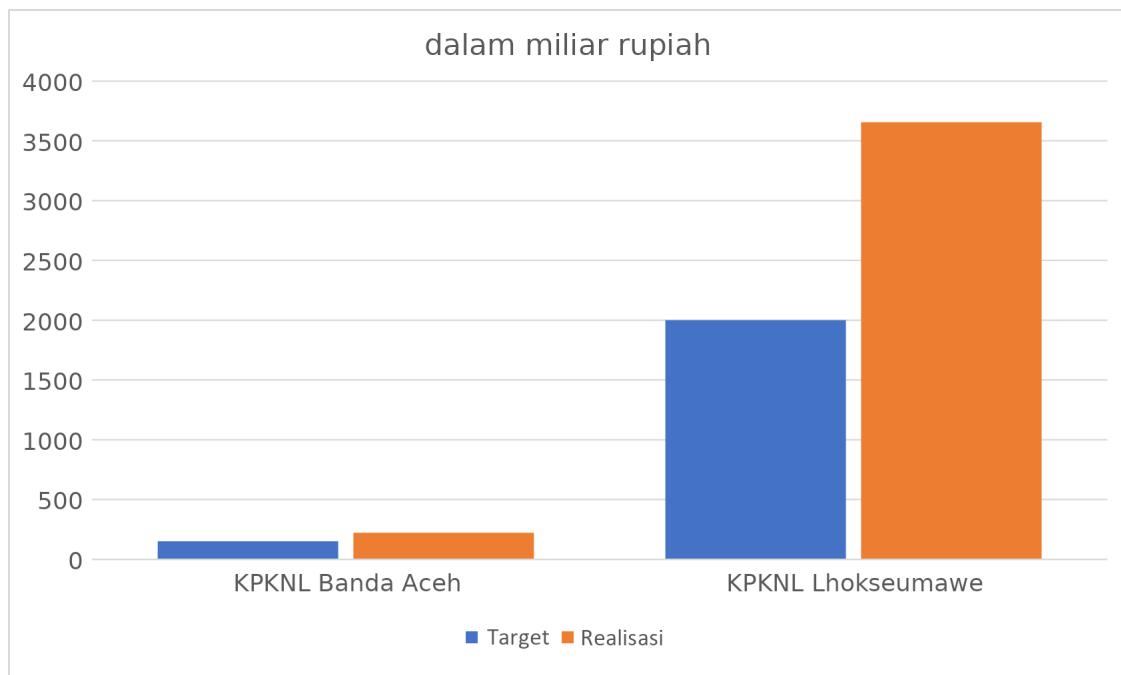
Program keringanan utang melalui Crash Program Tahun 2022 sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya karena terdapat keringanan utang bagi Penanggung Utang dengan kategori khusus (diskon 80%), syarat administrasi lebih dipermudah, permohonan Crash Program dapat diajukan oleh pihak ketiga, dan Penanggung Utang dari kelompok piutang Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR/TGR Pihak Ketiga) merupakan objek Crash Program.

Pada dasarnya selama tahun 2022, terdapat isu utama yakni keberadaan debitur dan barang jaminan debitur tidak diketahui lokasinya. Hal tersebut berimplikasi terhadap upaya penurunan outstanding cenderung melalui PSBDT. Oleh karena itu, sebagai solusi dilakukan pemetaan alamat debitur dan melaksanakan penagihan langsung ke lapangan serta meningkatkan tahap pengurusan Piutang Negara.

Adapun Target dan realisasi penurunan outstanding Piutang Negara pada Kanwil DJKN Aceh dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) KPKNL Banda Aceh sebesar Rp150.000.000,00, berhasil terealisasi sebesar Rp222.354.227,00,00; dan

- 2) KPKNL Lhokseumawe sebesar Rp2.000.000.000,00, berhasil terealisasi sebesar Rp3.656.559.291,00



Tabel Simulasi Progress Capaian IKU

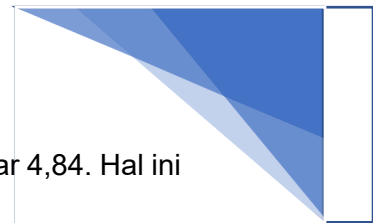
			Target 2022		Q1	Q2	Semester 1	Q3	s. d. Q3	s. d. Desember 2022	2022
			Target Awal Tahun 2022	Target Adendum							
2b-CP	PM	Perseniasse Penurunan Outstanding Piutang Negara	MAXTLK		Q1						
		Evaluasi Kinerja BKN	Rp 500.000.000	Rp 2.750.000.000	Rp 387.450.283	Rp 1.779.966.847	Rp 1.779.966.847	Rp 2.494.456.125	Rp 2.494.456.125	Rp 3.878.913.518	Rp 3.878.913.518
		KPKNL Banda Aceh	Rp150.000.000,00	Rp150.000.000,00	Rp 58.391.130	Rp195.051.530,00	Rp 195.051.530	Rp 179.417.942	Rp 179.417.942	Rp 222.954.226,54	Rp 222.954.227
		KPKNL Lhokseumawe	Rp350.000.000,00	Rp2.000.000.000,00	Rp 328.068.163	Rp1.644.909.317,81	Rp 1.644.909.317	Rp 2.315.038.183	Rp 2.315.038.183	Rp 3.656.559.291,16	Rp 3.656.559.291
Capaian IKU					77,49%	355,99%	355,99%	116,02%	116,02%	180,41%	180,41%

Dari keseluruhan total realisasi, Kanwil DJKN Aceh mampu menyelesaikan outstanding Piutang Negara sebesar Rp3.878.913.578,00 dengan nilai 180,41%.

6. (3a-N) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL

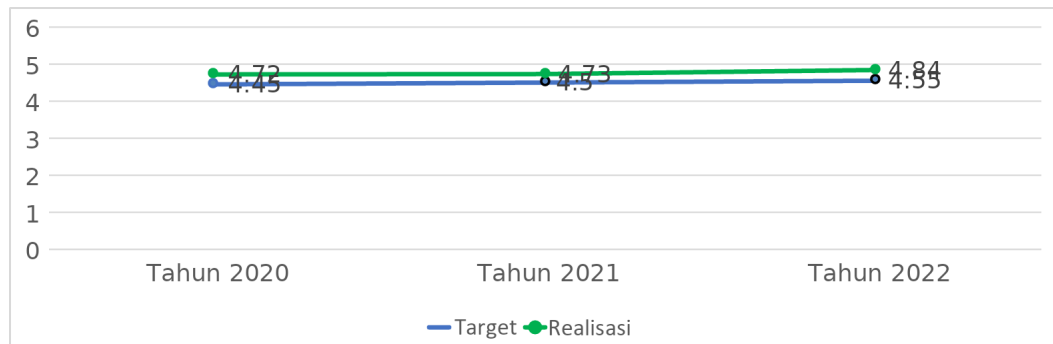
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	4,55	4,84	106,37%

Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan nilai kepuasan pelanggan atas pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan. Pelaksanaan survei lebih difokuskan pada penilaian atas penyelesaian layanan unggulan (*quick win*) dengan memberikan kuisioner kepada pengguna layanan. Survei dilakukan oleh pihak internal DJKN atau pihak eksternal DJKN (pihak independen).



Capaian Indeks kepuasan pengguna layanan tahun 2022 adalah sebesar 4,84. Hal ini melampaui target yakni 4.55.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Pengguna Layanan 3 Tahun terakhir



Tabel Simulasi Progress Capaian IKU

(a)	(b)	(c)	(d)	Target 2022							(j)			
				Target 2022		Q1	Q2	Semester 1	Q3	s. d. Q3		s. d. Desember 2022		
				Target Awal Tahun 2022	Target Adendum									
3	-	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)			
3-N	EM		Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	MAKNTLK										
			Target/Realisasi (rata-rata KPKNL dan Kanwil)	4,55								4,84	4,84	
			Kanwil DJKN Aceh	4,55								4,80	4,80	
			KPKNL Banda Aceh	4,55								4,82	4,82	
			KPKNL Lhokseumawe	4,55								4,90	4,90	
			Capaian IKU	-								4,84	4,84	

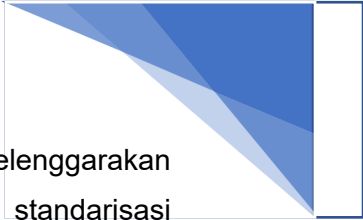
Hasil survei atas layanan di bidang pengelolaan kekayaan negara untuk lingkup Kanwil-KPKNL Banda Aceh (4,82) -KPKNL Lhokseumawe (4,90), dari target 4,55. Capaian Indeks Kepuasan Pengguna Layanan pada Unit Kanwil DJKN Aceh sebesar 4,80.

Dalam upaya pencapaian target yang telah ditetapkan, terdapat beberapa kendala yang ditemui. Kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya SDM pada Kanwil DJKN Aceh;
- b. Kurangnya pemahaman tentang ketentuan di bidang pengelolaan Kekayaan Negara.

Adapun kendala-kendala yang ditemui dapat diatasi dengan dilakukannya langkah-langkah penanganan masalah sebagai berikut:

- a. Optimalisasi SDM baik dalam pelayanan maupun pemberian informasi;
- b. Menyediakan layanan informasi dan konsultasi BMN melalui media sosial seperti *whatsapp*;

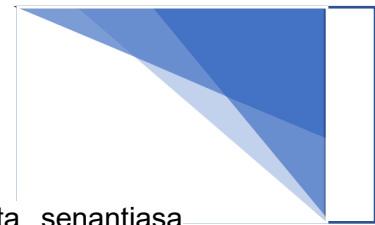
- 
- c. Melakukan *knowledge sharing* terkait peraturan BMN dan menyelenggarakan *focus group discussion* (FGD) terkait permasalahan, rencana dan standarisasi pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara;
 - d. Melaksanakan *Quality Assurance* terhadap pegawai.

Dan sebagai langkah antisipatif dalam penyelesaian target IKU dimaksud pada tahun 2022 adalah :

- a. Mengadakan sosialisasi Lantera KN di daerah-daerah yang dianggap memiliki potensi tinggi dalam perkembangan ekonomi.
- b. Mengadakan sosialisasi penggunaan *e-auction* melalui lelang.go.id bagi masyarakat luas dan bekerja sama dengan pegadaian syariah.
- c. Mengadakan diskusi mengenai standarisasi pelayanan kepada *stakeholder* di bidang pengelolaan kekayaan negara area pelayanan terpadu;
- d. Menyusun brosur tentang pengelolaan BMN, piutang negara dan lelang;
- e. Mengadakan *knowledge sharing* dan FGD serta *Quality Assurance* terkait pengelolaan kekayaan negara;
- f. Melibatkan SDM unit lain.

Menurut hasil survei, beberapa responden memberikan perspektif kepuasan dengan level baik dan sangat baik terhadap layanan yang diberikan oleh Bidang PKN. Berdasarkan masukan-masukan responden dan analisis yang dilakukan, terdapat beberapa area yang layak untuk dijadikan perhatian dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan, khususnya layanan unggulan di Bidang PKN, diantaranya:

1. Frekuensi pelatihan BMN perlu ditambah untuk memudahkan satker dalam mengoperasikan aplikasi terkait pelaporan BMN dan updating data BMN;
2. Pelatihan, sosialisasi dan FGD disarankan untuk direncanakan secara matang dan tidak mendadak, sehingga terdapat ketersediaan waktu yang cukup bagi satker yang diundang dalam mempersiapkan diri dan administrasinya;
3. Informasi terbaru terkait dengan BMN maupun updating aplikasi BMN disarankan untuk di share kepada seluruh satker agar dapat cepat diketahui dan diinternalisasi di lingkup satker;
4. Ruang APT (Area Pelayanan Terpadu) bersama perlu dioptimalkan dalam rangka peningkatan pemberian pelayanan dan kenyamanan bagi para stakeholder;
5. Target IPKL terpenuhi.



Tindakan yang telah dilaksanakan:

1. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada stakeholders, serta senantiasa melakukan perbaikan dalam proses bisnis layanan guna memberikan kepuasan pengguna layanan;
2. Telah dilaksanakan koordinasi ke KPKNL Banda Aceh dan KPKNL Lhokseumawe.

Rekomendasi rencana Aksi:

1. Melaksanakan identifikasi dan *mapping stakeholder* pengguna layanan unggulan Kanwil DJKN Aceh;
2. Tahun 2023 kualitas pelayanan yang diberikan oleh Kanwil DJKN Aceh Khususnya Bidang PKN harus jauh lebih baik di tahun ini. Pelayanan yang diberikan harus melampaui ekspektasi stakeholders. ini adalah DNA seorang ASN, ASN bukan dilayani namun melayani.

7. 4a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%	76%	117,32%

Penggunaan Barang Milik Negara yang sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) Barang Milik Negara atas pengelolaan Aset Negara termasuk *existing* luasan BMN satker yang sedang dimanfaatkan dengan persetujuan Pengelola Barang.

Formula untuk menghitung tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK adalah Total luas hasil pengukuran penggunaan BMN sesuai SBSK pada Satker target di wilayah kerja Kanwil berdasarkan data dan kertas kerja yang telah disampaikan oleh KPKNL di wilayah kerjanya termasuk luasan BMN satker yang sedang dimanfaatkan dengan persetujuan Pengelola Barang dibagi total luas BMN target. Tujuannya adalah untuk optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara.

Tabel Simulasi Progress Capaian IKU

No	Kategori	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2022		Q1	Q2	Semester 1	Q3	s. d. Q3	s. d. Desember 2022	2022	
			Target Awal Tahun 2022									
			Target Awal Tahun 2022	Target Adendum								
4	4a-CP	PM	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	MAXITLK								
			Target tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%		#DIV/0!	79%	78,58%	90,98%	90,98%	76,26%	76,26%
			KPKNL Banda Aceh	62%		77%	77%	73,44%	73%	71,88%	71%	71%
			KPKNL Lhokseumawe	62%		80%	80%	108,52%	108%	81,34%	81%	81%
			Capaian IKU			#DIV/0!	78,58%	78,58%	90,98%	90,98%	76,26%	76,26%

Realisasi capaian tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK pada Kanwil DJKN Aceh sebesar 76% dari target 65% atau sebesar 117,32%.

8. 4b-CP Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikatkan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	100%	108,55%	108,55%

Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Penswertipkatan BMN berupa Tanah, dengan tugas/kewajiban masing-masing pihak sebagai berikut:

Kendali BPN:

1. Melaksanakan penswertipkatan BMN;
2. Rekapitulasi data BMN berupa tanah yang telah disertifikatkan

Kendali K/L:

1. Inventarisasi dan identifikasi BMN belum bersertifikat beserta permasalahannya;
2. Melengkapi persyaratan penswertipkatan BMN;
3. Menunjukkan letak dan tanda batas tanah;
4. Menyampaikan rekapitulasi data yang akan disertifikatkan;
5. Mengajukan permohonan sertifikasi;
6. Menyusun dan mengajukan anggaran sertifikasi;
7. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMN, paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya sertipikat.

Kendali Kemenkeu:

1. Menyimpan asli sertipikat;
2. Updating data BMN yang akan disertifikatkan;
3. Permintaan data BMN bersertifikat kepada BPN;
4. Pengalokasian anggaran sertifikasi

Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah terdiri dari tahapan:

1. Permintaan kepada K/L mengenai jumlah BMN yang sudah bersertifikat dan belum bersertifikat
2. Identifikasi BMN berupa tanah yang belum memiliki sertifikat. Identifikasi dilakukan dengan memetakan tanah belum bersertifikat pada K/L berdasarkan lokasi, luas tanah, nilai BMN dan nama pemilik
3. Penyusunan data BMN belum bersertifikat yang diperkirakan dapat disertifikatkan



4. K/L melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sertifikasi untuk BMN yang tidak memiliki permasalahan
5. Penyampaian rekomendasi BMN berupa tanah berstatus clean and clear (dokumen persyaratan sertifikasi lengkap dan tidak memiliki permasalahan) kepada BPN untuk disertifikatkan
6. Pelaksanaan sertifikasi oleh BPN c.q. Kantor Pertanahan.

Di Tahun 2022, Kanwil DJKN Aceh mendapatkan target penyelesaian Program Percepatan Pensertipikatan BMN Berupa Tanah (Program Sertipikasi BMN) sebanyak 3.713 rekomendasi bidang tanah dan sebanyak 227 rekomendasi bidang tanah untuk penyelesaian bidang tanah yang bersertipikat belum sesuai ketentuan, sehingga total ada 3.940 bidang tanah. Mengingat besarnya jumlah target Program Sertipikasi BMN yang harus diselesaikan tersebut, Kanwil DJKN Aceh perlu melakukan langkah-langkah progresif koordinatif untuk memastikan penyelesaian target dalam waktu yang ditentukan. Sebagai upaya percepatan Program Sertipikasi BMN Tahun 2022, KPKNL telah berkoordinasi dengan seluruh satker yang terlibat agar segera melengkapi dan menyerahkan berkas permohonan sertipikasi BMN. Menindaklanjuti hasil koordinasi tersebut, beberapa satker telah menyerahkan berkas permohonan ke KPKNL Banda Aceh untuk diverifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, berkas permohonan disampaikan ke Kantor Pertanahan untuk dilakukan tahapan selanjutnya yaitu pengukuran. Oleh karena itu, untuk mempercepat proses penyelesaian Program Sertipikasi BMN, berkas-berkas tersebut perlu segera diserahkan ke Kantor Pertanahan untuk ditindaklanjuti.

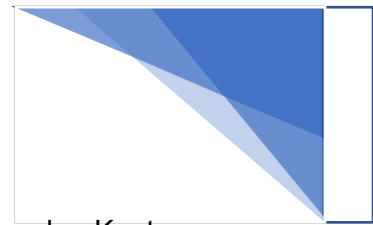
Pada tahun 2022, Kanwil DJKN Aceh berhasil merealisasikan 4.277 dari target 3.940 bidang tanah yang disertifikatkan, dengan capaian sebesar 108,55%.

Tabel Simulasi Progress Capaian IKU

(1)	(2)	(3)	(4)	Target 2022		Q1	Q2	Semester 1	Q3	s. d. Q3	s. d. Desember 2022	2022
				Target Awal Tahun 2022	Target Adendum							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
4b-CP	PL		Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	MAXTLK	Q1							
			KPKNL Banda Aceh	2.013	5	356	356	1.236	1.236	2.127	2.127	2.127
			KPKNL Lhokseumawe	1.927	5	272	272	1446	1446	2.700	2.700	2.700
			Jumlah target realisasi bidang tanah yang telah disertifikatkan	3.940	10	628	628	2.682	2.682	4.277	4.277	4.277
			Capaian IKU	-		0,25%	15,94%	15,94%	68,07%	68,07%	108,55%	108,55%

Meskipun demikian, terdapat kendala yang dihadapi dalam sertipikasi BMN, antara lain:

1. Lambatnya proses pengukuran bidang tanah oleh Satker BPKS yang antara lain disebabkan Satker tidak mengetahui secara pasti batas bidang tanah yang akan disertipikatkan;
2. Proses Alih Status Penggunaan dari BPKS dan Lantamal Belawan serta Hibah Tanah dari Pemko Sabang untuk Waduk Paya Seunara belum selesai;



3. Masih terdapat bidang tanah yang belum dilakukan pengukuran;
4. Masih terdapat kekurangan berkas yang belum disampaikan Satker ke Kantor Pertanahan;
5. Terdapat berkas permohonan yang belum disampaikan ke Kantor Pertanahan atas bidang tanah yang mengalami pemecahan;
6. Kepala Desa tidak berkenan menghadiri pengukuran dan menandatangani dokumen kelengkapan atas beberapa bidang tanah;
7. Telah terbit SHM/SHP atas bidang-bidang tanah yang menjadi target;
8. Tidak adanya Sertipikat Asli sebagai dokumen yang dibutuhkan dalam penyelesaian BBSK di beberapa Satker.

Adapun tindakan yang telah dilaksanakan:

1. Rapat Monitoring dan Evaluasi atas Progress Pelaksanaan Program Percepatan Pensertipikatan BMN Berupa Tanah 2022 secara berkala (mingguan dan bulanan) baik tingkat Satker maupun KPKNL;
2. Koordinasi dengan Satuan Kerja dan Kantor Pertanahan dengan kunjungan ke lapangan dan virtual;
3. Melakukan pendampingan pada Satker BPKS dalam Pensertipikatan BMN Tahun 2022;
4. Melakukan identifikasi bidang-bidang tanah sebagai pengganti target bidang tanah yang tidak dapat dilanjutkan pensertipikatannya;
5. Koordinasi intensif dengan Satuan Kerja, Kanwil BPN Aceh, dan Kantor Pertanahan.

9. 4c-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%	120%	120%

IKU Persentase Efektifitas Penyelesaian BKPN menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN (Umur Piutang sudah lama).



Pada tahun 2022, Kanwil DJKN Aceh berhasil merealisasikan 54 dari 45 BKPN, dengan capaian sebesar 120%.

Terdapat beberapa kendala yang ditemukan diantaranya seperti:

1. keberadaan debitur dan barang jaminan debitur tidak diketahui lokasinya;
2. Penyelesaian target program Crash Program

Kendala tersebut berimplikasi terhadap upaya penyelesaian BKPN cenderung melalui PSBDT, sedangkan untuk target program crash program diselesaikan dengan pelunasan oleh debitur

Lebih lanjut, upaya-upaya yang telah dilakukan:

1. Memetakan alamat debitur dan Melaksanakan penagihan langsung ke lapangan;
2. Meningkatkan tahap pengurusan terhadap beberapa debitur;
3. melaksanakan penagihan langsung kepada debitur saat musim panen;
4. meningkatkan tahap pengurusan terhadap debitur (Surat Paksa, Surat Perintah Penyitaan, SPPBS);
5. melaksanakan panggilan penyelesaian piutang terhadap seluruh debitur.

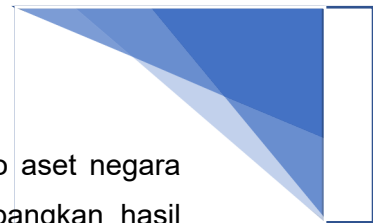
Tabel Simulasi Progress Capaian IKU

	Target 2022		Q1	Q2	Semester 1	Q3	s. d. Q3	s. d. Desember 2022	2022
	Target Awal Tahun 2022	Target Adendum							
4-CP	PM	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	MAXTLK						
		KPKN Banda Aceh	10	3	5	5	10	10	10
		KPKN Lhokseumawe	35	3	22	22	30	30	44
		Target/Realisasi Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	45	6	27	27	40	40	54
		Capaian IKU		13,33%	60,00%	60,00%	80,83%	80,83%	120,00%

10. 4d-N Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	110,35%	110,35%

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis.



Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 trilyun (dengan mempertimbangkan hasil revaluasi aset).

Formula untuk menghitung implementasi evaluasi kinerja BMN adalah jumlah asset yang dievaluasi kinerjanya dibagi dengan jumlah target asset yang akan dievaluasi dikalikan 100%. Tujuannya adalah terwujudnya struktur portofolio aset negara yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada publik melalui rekomendasi skema pengelolaan aset yang lebih baik bagi Pengguna dan Pengelola Barang.

Total target Kanwil DJKN Aceh pada tahun 2022 yakni 350 NUP dengan rincian KPKNL Banda Aceh 300 NUP dan KPKNL Lhokseumawe 50 NUP (350 NUP). Realisasi tahun 2022 Kanwil DJKN Aceh memperoleh total 410, dengan capaian sebesar 110,35%.

Tabel Simulasi Progress Capaian IKU

			Target 2022		Q1	Q2	Semester 1	Q3	s. d. Q3	s. d. Desember 2022	2022
			Target Awal Tahun 2022	Target Adendum							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
45N	PH	Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	MAXTLK		Q1						
		KPKNL Banda Aceh	300		31	173	173	224	224	360	360
		KPKNL Lhokseumawe	50		8	25	25	39	39	50	50
		Target/Realisasi Evaluasi Kinerja BMN	350		39	198	198	263	263	410	410
		KPKNL Banda Aceh	1515		0	666	666	710	710	1575	1575
		KPKNL Lhokseumawe	174		0	71	71	133	133	174	174
		Target/Realisasi Penyusunan dan Pencapaian Rekomendasi	1689		0	737	737	843	843	1749	1749
		TOTAL	2039								
		Capaian IKU			5,57%	50,10%	50,10%	62,53%	62,53%	110,35%	110,35%

11. 5a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

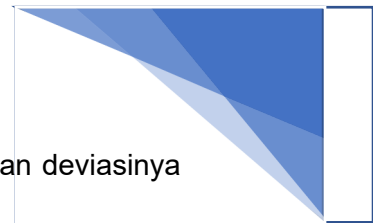
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%	0,41%	120%

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu.

Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN).

Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.

Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang



dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%.

Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama.

Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.

Realisasi deviasi ketergunaan hasil penilaian pada Kanwil DJKN Aceh tahun 2022 sebesar 0,41% dari target 19%.

Tabel Simulasi Progress Capaian IKU

			Target 2022		Q1	Q2	Semester 1	Q3	s. d. Q3	s. d. Desember 2022	2022
	(1)	(2)	Target Awal Tahun 2022	Target Adendum							
5		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional									
5a-CP	PM	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	MINTLK								
		Kanwil DJKN Aceh	19%		0,00%	0,00%				0,00%	
		KPKNL Banda Aceh	19%		0,00%	0,07%	0,07%	0,05%	0,05%	0,04%	0,04%
		KPKNL Lhokseumawe	19%		0,00%	1,58%	1,56%	0,71%	0,71%	1,20%	1,20%
		Target/Realisasi Deviasi ketergunaan hasil penilaian	19%		0,00%	0,54%	0,54%	0,38%	0,38%	0,41%	0,41%
		Capaian IKU			0,00%	0,54%	0,54%	0,38%	0,38%	0,41%	0,41%

12. 6a-N Persentase Pelaksanaan Lelang e-auction dan e-conventional auction

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase Pelaksanaan Lelang e-auction dan e-conventional auction	92%	100%	108,70%

E-auction adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet. E-auction ini terdiri dari 2 jenis, yaitu ALE (aplikasi lelang melalui email) dan ALI (aplikasi lelang melalui internet sehingga lebih real time dan terbuka).

Pemanfaatan TIK berbasis internet ini diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih optimal dan transparan. Hal ini dikarenakan e-auction dapat menjangkau peserta lebih luas



serta peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pengaturan harga lelang.

Implementasi *e-auction* meliputi:

- 1) Pelaksanaan Lelang *e-Auction* adalah lelang tanpa kehadiran peserta lelang.
- 2) *E-Conventional Auction* adalah lelang dengan kehadiran peserta lelang yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengelolaan infrastruktur pendukung lelang (pembayaran uang jaminan menggunakan *Virtual Account*)

Tujuan *e-auction* adalah:

- 1) menghemat waktu, biaya, dan tenaga karena tidak perlu kehadiran di lokasi lelang,
- 2) memungkinkan peserta lelang dapat mengikuti lelang dimanapun dan kapanpun,
- 3) menghilangkan intimidasi ataupun kerja sama dalam bentuk negatif,
- 4) menghasilkan nilai transaksi lelang yang optimal bagi pemohon lelang sekaligus meningkatkan PNBPN lelang, dan
- 5) perbaikan citra layanan lelang di hadapan para pengguna layanan.

Capaian realisasi frekuensi *e-Auction* Tahun 2022 pada Kanwil DJKN Aceh (total realisasi KPKNL Banda Aceh dan KPKNL Lhokseumawe) adalah sebanyak 757 frekuensi, sedangkan untuk *e-Conventional auction* sebanyak 0 frekuensi. Oleh karena itu, tercapai kinerja hingga 108,70%.

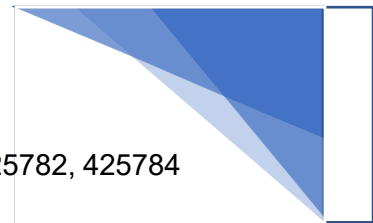
Tabel Simulasi Progress Capaian IKU

			Target 2022		Q1	Q2	Semester 1	Q3	s. d. Q3	s. d. Desember 2022	2022
			Target Awal Tahun 2022	Target Adendum							
6	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif								
6a-N		PM	Persepsi pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	MAX7LK	01						
			Jumlah realisasi Frekuensi e-Auction		121	274	274	499	499	758	757
			Kanwil DJKN Aceh					1	1	1	
			KPKNL Banda Aceh		70	165	165	304	304	467	467
			KPKNL Lhokseumawe		51	109	109	194	194	290	290
			Jumlah realisasi Frekuensi e-Conventional Auction		0	0	0	0	0	0	0
			KPKNL Banda Aceh		0	0	0	0	0	0	0
			KPKNL Lhokseumawe		0	0	0	0	0	0	0
			Capaian realisasi e-Auction		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Capaian Realisasi e-Conventional Auction		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Jumlah Target/Realisasi pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	92%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Capaian IKU		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

13. 6b-N Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10%	2,11%	120%

PNBPN Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBPN DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBPN yang berasal dari Biad Pengurusan Piutang Negara

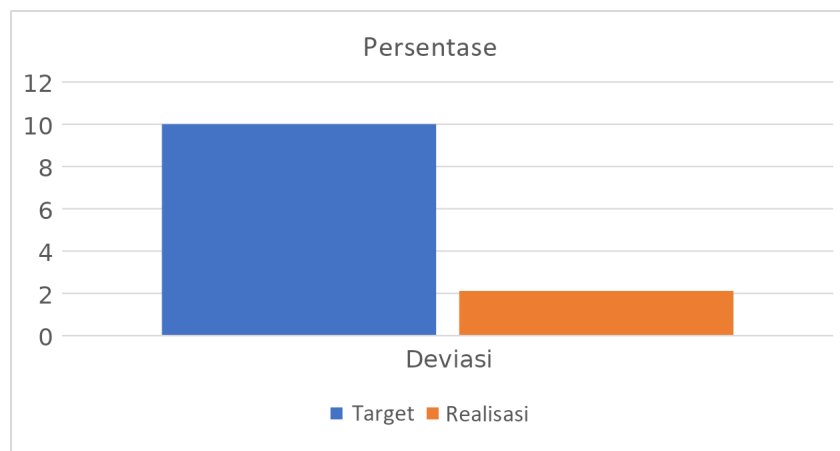


dengan MAP: 425785 dan Bea Lelang dengan MAP 425783 (PL II) dan 425782, 425784 (PL I dan Pegadaian).

Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN, diukur dari:

- 1) Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi;
- 2) Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425783, 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang* dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Rekonsiliasi antara kedua data tersebut dilakukan maksimal tanggal 7 pada setiap periode bulan berikutnya setelah periode bulan berakhir.



Tabel Simulasi Progress Capaian IKU

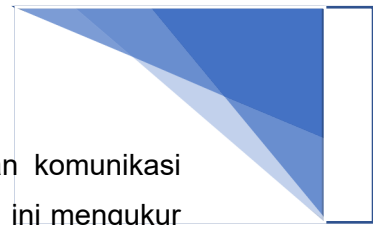
			Target 2022		Q1	Q2	Semester 1	Q3	s. d. Q3	s. d. Desember 2022	2022
			Target Awal Tahun 2022	Target Adendum							
Bb-N	PM	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	MINTLK								
		Kanwil DJKN Aceh	10%		0,00%	0,00%					0,00%
		KPKNL Banda Aceh	10%		0,03%	0,51%	0,51%	0,11%	0,11%	0,10%	0,10%
		KPKNL Lhokseumawe	10%		1,31%	0,74%	0,74%	4,48%	4,48%	6,24%	6,24%
		Target/Realisasi Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	10%		0,67%	0,42%	0,42%	2,30%	2,30%	2,11%	2,11%
		Capaian IKU			0,67%	0,42%	0,42%	2,30%	2,30%	2,11%	2,11%

Target Deviasi PNBP Fungsional DJKN pada Kanwil DJKN Aceh pada Tahun 2022 adalah 10% dan berhasil membukukan realisasi hingga akhir tahun 2022 yaitu sebesar 2,11%. Oleh karena itu, perolehan capaian kinerja sebesar 120%.

14. 7a-N Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	92,00	98,10	106,63%

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi digunakan untuk mengukur persepsi peserta atas 1) tingkat pemahaman, 2) kualitas materi, 3) kualitas fasilitator, dan 4) kualitas



pendukung pelatihan/sosialisasi yang dilaksanakan. Proses edukasi dan komunikasi dilakukan dengan media seperti pelatihan, sosialisasi, atau workshop. IKU ini mengukur edukasi yang dilakukan oleh kanwil kepada pihak eksternal, seperti satuan kerja (K/L), pemohon lelang, pembeli lelang, masyarakat, dan lainnya. Kegiatan edukasi ini dilakukan paling tidak sebanyak dua kali dalam setahun (setiap semester satu kali).

Pembobotan atas empat indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) tingkat pemahaman peserta (bobot 70%), dengan pertimbangan fokus pelaksanaan edukasi adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta;
- 2) kualitas materi (bobot 15%);
- 3) kualitas fasilitator (bobot 10%), dan
- 4) kualitas fasilitas pelatihan (bobot 5%).

Kuesioner dan cara perhitungan tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi dapat diunduh pada tautan: http://bit.ly/FormatKuesioner_KertasKerjaReviu

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi diukur dengan indeksasi sebagai berikut:

Tingkat kepuasan	Skala
Sangat Efektif	$80 < x \leq 100$
Efektif	$60 < x \leq 80$
Kurang efektif	$40 < x \leq 60$
Efektif	$20 < x \leq 40$
Sangat Efektif	$0 \leq x \leq 20$

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dalam menjalankan tugasnya, Kanwil DJKN menyelenggarakan fungsi untuk memberikan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi di bidang kekayaan negara, pengelolaan piutang negara, penilaian, dan lelang pada KPKNL di lingkungan kantor wilayah. Proses bimbingan dapat dilakukan melalui media surat, bimbingan langsung, konsultasi, dan lainnya.

Tingkat efektivitas bimbingan kantor wilayah kepada KPKNL merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai efektifitas pelaksanaan bimbingan yang dilakukan oleh kantor wilayah. Tingkat efektivitas diperoleh dari hasil survei internal yang dilakukan oleh kantor wilayah dengan menyebarkan kuisisioner kepada KPKNL pada setiap semester. Pertanyaan dalam kuisisioner mengukur tingkat persepsi atas efektivitas bimbingan yang dilakukan oleh kantor wilayah kepada KPKNL.

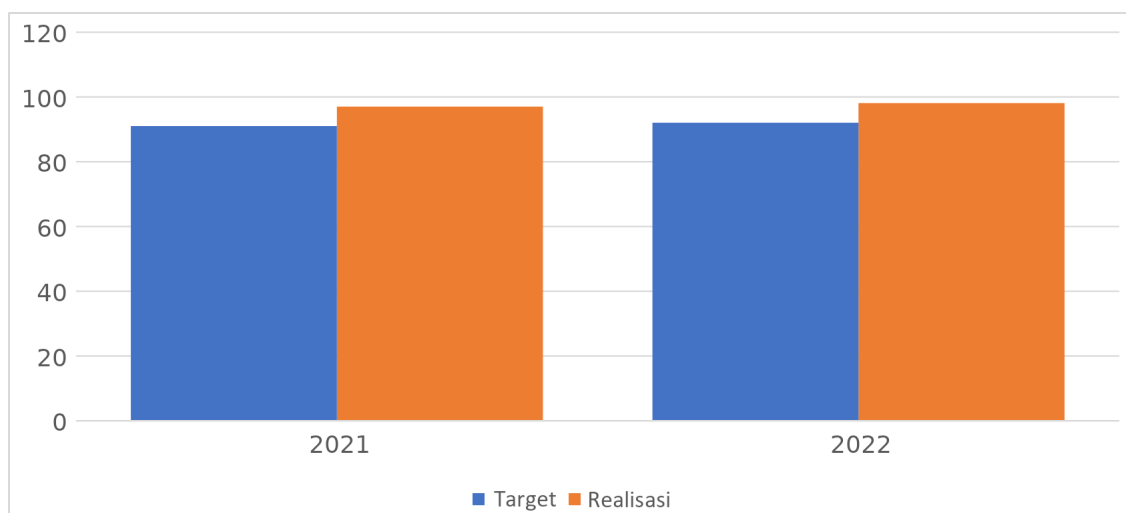
Untuk tahun 2022, target tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi pada Kantor Wilayah DJKN Aceh adalah 92 dan berhasil merealisasikan sebesar 98,10 dengan capaian hingga 106,63%. Dibandingkan dengan tahun 2021, capaian tahun 2022 mengalami kenaikan.

Tabel perbandingan Tingkat Efektifitas Edukasi dan Komunikasi

Indikator	2021	2022
Target	91	92
Realisasi	97,02	98,10
Kinerja	106,61%	106,63%

Tabel Simulasi Progress Capaian IKU

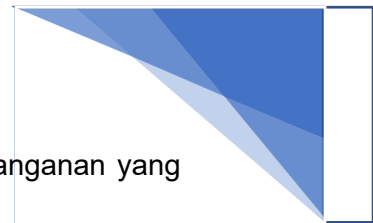
			Target 2022		Q1	Q2	Semester 1	Q3	s. d. Q3	s. d. Desember 2022	2022
			Target Awal Tahun 2022	Target Adendum							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7>N	PIM		Tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi	MAX/AVG							
			Karwil D.KN Aceh	92		96,46	98,46			97,74	98,10
			Data Untuk Kebutuhan Monev Karwil Pada Tiap KPNL (Tidak Masuk Hitungan IKU)								
			KPNL Banda Aceh	92				92,00	92,00	96,30	
			KPNL Lhokseumawe	92		92,22		92,22	92,22	95,11	
			Targetrealisasi efektifitas edukasi dan komunikasi	92		96,46	98,46	0,00	98,46	97,74	98,10
			Capaian IKU	-			98,46		98,46		98,10



15. 8a-CP Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan Negara	85%	90,91%	106,95%

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada K/L terutama terkait aspek utilisasi-nya. IKU ini difokuskan pada pemantauan utilisasi berupa pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau



adalah tindak lanjut atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh DJKN selaku pengelola barang.

Kriteria ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:		
Kategori	Jenis Persetujuan Utilisasi	Kriteria sudah Ditindaklanjuti
Pemanfaatan	Sewa	1. Surat perjanjian 2. SSBP
	Kerja Sama Pemanfaatan	1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan)
	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna	1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan)
	Pinjam Pakai	1. Surat perjanjian 2. Berita acara serah terima
	Kerja Sama Pemanfaatan Infrastruktur	1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan)
Pemindahtanganan	Penjualan	1. Risalah lelang atau dokumen perjanjian jual/sewa beli dalam hal penjualan dilakukan tanpa melalui lelang 2. SSBP
	Tukar Menukar	1. Berita acara serah terima 2. Keputusan penetapan status penggunaan untuk barang pengganti
	Hibah	Berita acara serah terima
	Penyertaan Modal Pemerintah Pusat	Berita acara serah terima

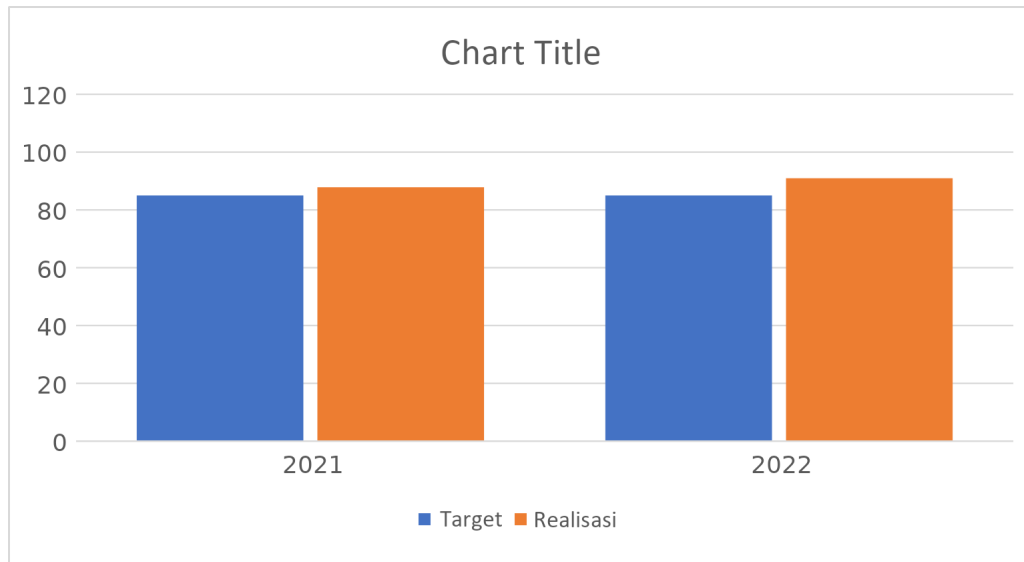
Realisasi persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara di Kanwil DJKN Aceh Tahun 2022 sebesar 90,91% dari target 85%.

Tabel Simulasi Progress Capaian IKU

(1)	(2)	(3)	(4)	Target 2022		Q1	Q2	Semester 1	Q3	s. d. Q3	s. d. Desember 2022	2022
				Target Awal Tahun 2022	Target Adendum							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
8			Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif									
8a	CP	PM	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	MAV/TK								
		a	Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2021 yang ditindaklanjuti oleh K/L				64	64		64	69	69
			Kanwil DJKN Aceh				0				0	
			KPRNL Banda Aceh				41	41		41	44	44
			KPRNL Lhokseumawe				23	23		23	25	25
		a	Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester I 2022 yang ditindaklanjuti oleh K/L				40	40		40	71	
			Kanwil DJKN Aceh				0				1	1
			KPRNL Banda Aceh				29	29		29	48	48
			KPRNL Lhokseumawe				11	11		11	22	22
		b	Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester I 2021				73	73		73	73	73
			Kanwil DJKN Aceh				0				0	
			KPRNL Banda Aceh				47	47		47	47	47
			KPRNL Lhokseumawe				26	26		26	26	26
		b	Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester I 2022				81	81		81	81	81
			Kanwil DJKN Aceh				1	1		1	1	1
			KPRNL Banda Aceh				54	54		54	54	54
			KPRNL Lhokseumawe				26	26		26	26	26
			Target Realisasi Jumlah tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%			67,53%	67,53%		67,53%	90,91%	90,91%
			Capaian IKU					67,53%		67,53%	90,91%	

Tabel perbandingan Realisasi Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset

INDIKATOR	2021	2022
Target	85%	85%
Realisasi	87,82%	90,91%
Capaian Kinerja	103,32%	106,95%



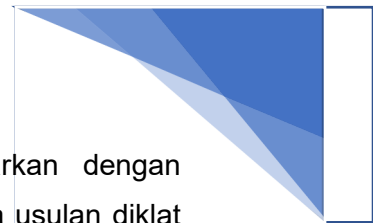
16. 9a-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120,00%	120%

Indikator kinerja ini mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya.

Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 24 Jam Pelatihan, serta minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan. Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 24 jam pelatihan (JP).1 jamlat adalah 45 menit. Standar jamlat minimal per tahun per pegawai adalah total 24 jamlat.

Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK Nomor 216/PMK.01/2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan.



Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada modul DKI. Pegawai yang dimaksud adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja aktif di Kementerian Keuangan.

Dikecualikan dari formula IKU ini adalah:

- bawahan yang akan pensiun di tahun 2022;
- bawahan yang sedang/dalam status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan;
- bawahan yang aktif kembali dari status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan setelah 30 September 2022;
- Pegawai yang mutasi setelah 30 November 2022 tidak diperhitungkan di unit barunya
- pegawai pada unit non-eselon

Tabel Simulasi Progress Capaian IKU

			Target 2022		Q1	Q2	Semester 1	Q3	s. d. Q3	s. d. Desember 2022	2022
			Target Awal Tahun 2022	Target Adendum							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)
9		SDM yang Kompeten									
Sa-N	FM	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	MAX/TLK								
		Satker Karwil									
a		Jumlah bawahan yang memenuhi kriteria Karwil DJKN Aceh			9	18	18	32	32	34	34
b		Jumlah bawahan yang telah melebihi kriteria Karwil DJKN Aceh			9	17	17	32	32	34	34
c		Jumlah bawahan total Karwil DJKN Aceh			33	29	29	32	32	34	34
		% Capaian Utama			27,27%	62,07%	62,07%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		% Capaian Tambahan			27,27%	58,62%	58,62%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Capaian IKU	100%		32,73%	73,79%		120,00%		120,00%	

Pada tahun 2022, di lingkungan Kantor Wilayah DJKN Aceh persentase pegawai yang memenuhi kompetensi 120% atau sama dengan capaian tahun 2021.

17. 10a-N Nilai Pemenuhan Unit Kerja Terhadap Kriteria ZI Menuju WBBM

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Nilai Pemenuhan Unit Kerja Terhadap Kriteria ZI Menuju WBBM	85	96,56	113,60%

Pembangunan ZI WBBM merupakan salah satu program yang mendukung sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi; birokrasi yang efektif dan efisien; dan birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang berkualitas. Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui

reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang disingkat (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan Hasil Evaluasi ZI WBK/WBBM yang disampaikan oleh Inspektur IV, Itjen Kemenkeu melalui Nota Dinas Nomor ND-547/IJ.5/2022 tanggal 8 Desember 2022, disebutkan bahwa Kanwil DJKN Aceh telah memenuhi kriteria untuk mendapatkan predikat ZI/WBBM dari KemenPANRB.

Tabel Simulasi Progress Capaian IKU

			Target 2022		Q1	Q2	Semester 1	Q3	s. d. Q3	s. d. Desember 2022	2022
			Target Awal Tahun 2022	Target Adendum							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
10			Organisasi yang Fit For Purpose								
	10b-N	FKM	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBBM	MAK/TLK							
			Kanwil DJKN Aceh	85						95,56	95,56
			Capaian IKU								95,56

18. 10b-N Nilai Review Pengelolaan Kinerja

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Nilai reuiu pengelolaan kinerja	80	95,72	119,65%

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan telah menerapkan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan dengan menetapkan kebijakan baru terkait manajemen kinerja agar pengelolaan kinerja menjadi terukur dan terarah. Peraturan terkait manajemen kinerja berbasis ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 Tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut.

Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi dan intensitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi, sebagaimana berikut:

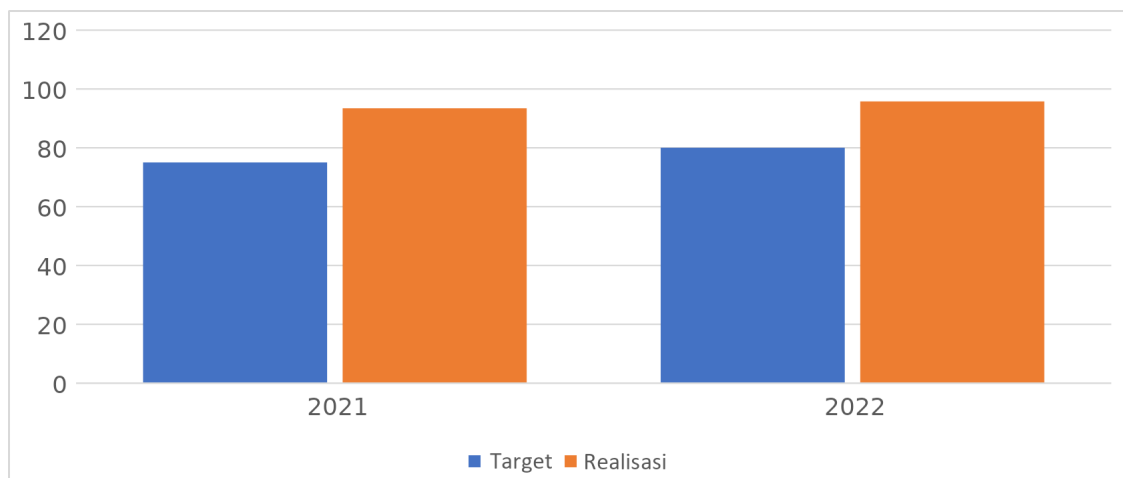
Proses penilaian tingkat kantor wilayah dilakukan oleh MKO Kantor Pusat DJKN. Sedangkan tingkat KPKNL dilakukan penilaian oleh tingkat Kanwil (SMKO). MKO akan melakukan verifikasi secara sampling terhadap hasil penilaian Kanwil kepada KPKNL.

Nilai	Predikat
$90 \leq X \leq 100$	Kami mengelola kinerja dengan sangat baik
$80 \leq X < 90$	Kami mengelola kinerja dengan baik
$70 \leq X < 80$	Kami mengelola kinerja dengan cukup baik
$50 \leq X < 70$	Kami mengelola kinerja dengan kurang baik
< 50	Kami mengelola kinerja dengan tidak baik

Tujuan IKU ini adalah untuk mengetahui seberapa perkembangan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan DJKN serta untuk menghasilkan umpan balik yang positif bagi perbaikan kualitas pengelolaan kinerja di masa mendatang.

Tabel Simulasi Progress Capaian IKU

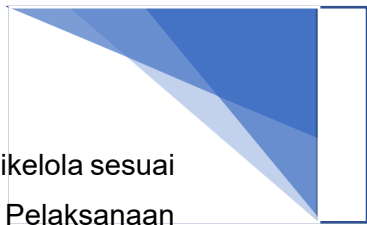
			Target 2022		Q1	Q2	Semester 1	Q3	s. d. Q3	s. d. Desember 2022	2022
			Target Awal Tahun 2022	Target Adendum							
10-N	FKM	Nilai review pengelolaan kinerja									
		Kanwil DJKN Aceh	80							95,72	95,72
		Capaian IKU								95,72	95,72
		Data Linkuk Kepertuan Monev Kanwil Pada Tap KPKNL (Tidak Masuk Hilangan IKU)									
		KPKNL Banda Aceh	80							93,79	
		KPKNL Lhokseumawe	80							96,40	



Capaian realisasi nilai reuivu pengelolaan kinerja Tahun 2022 Kanwil DJKN Aceh sebesar 95,72 dari target 80 atau sebesar 119,65% lebih baik dibandingkan capaian Tahun 2021 yang mana realisasi 93.43 dari target 75.

19. 11a-CP Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%	97,55	102,16%



Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Capaian IKU PA di hitung sebagai berikut:

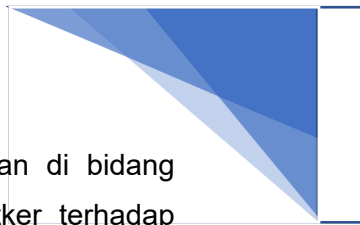
- a. Capaian IKU PKPA Triwulan I, II dan III mengacu pada capaian IKPA dari Januari sampai dengan triwulan periode pelaporan.
- b. Capaian tahunan dihitung sebagai komposit capaian SMART (40%) dan IKPA (60%) dengan bobot masing-masing sesuai perhitungan unsur Kualitas Anggaran Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) pada IKU Kinerja dan Harmonisasi Anggaran Pusat dan Daerah Kemenkeu-Wide.
- c. Capaian IKU PKPA Semester I s.d Triwulan III dan Tahunan sama dengan capaian triwulan periode pelaporan.

Pengukuran IKPA meliputi aspek:

- a. Kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran;
- b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran;
- c. Efektivitas pelaksanaan anggaran; dan
- d. Efisiensi pelaksanaan anggaran.

Pengukuran aspek kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran merupakan penilaian kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Indikator kinerja pada pengukuran aspek kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran terdiri dari:

- a. Revisi DIPA, yang dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal pagu anggaran tetap yang dilakukan oleh Satker dalam satu triwulan kecuali revisi DIPA dalam rangka penghematan atau *refocusing* anggaran.
- b. Deviasi Halaman III DIPA, yang dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan. Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rasio antara nilai penyimpangan/deviasi realisasi anggaran terhadap RPD yang telah dimutakhirkan.
- c. Pagu Minus dihitung berdasarkan rasio antara total nilai pagu minus terhadap pagu DIPA.



Pengukuran aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kepatuhan Satker terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran. Indikator kinerja pada pengukuran aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat terdiri dari:

- a. Penyampaian Data Kontrak dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyampaian data perjanjian/kontrak terhadap seluruh data perjanjian/kontrak yang didaftarkan ke KPPN.
- b. Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP) dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai.
- c. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara dihitung berdasarkan rasio penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran yang dilakukan secara tepat waktu terhadap seluruh kewajiban penyampaian LPJ.
- d. Dispensasi Penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) dihitung berdasarkan jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan penyampaian SPM melebihi batas waktu penyampaian SPM yang ditentukan pada akhir tahun anggaran.

Pengukuran aspek efektivitas pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran. Indikator kinerja pada pengukuran aspek efektivitas pelaksanaan anggaran terdiri dari:

- a. Penyerapan Anggaran, dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan. Nilai kinerja penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran pada setiap triwulan. Target penyerapan anggaran pada Triwulan I sebesar 15 persen, Triwulan II sebesar 40 persen, Triwulan III sebesar 60 persen, dan Triwulan IV sebesar 90 persen.
- b. Penyelesaian Tagihan, dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme SPM-LS Kontraktual terhadap seluruh SPM-LS Kontraktual yang diajukan ke KPPN.
- c. Capaian Output, dihitung berdasarkan rasio antara total nilai kinerja Rincian Output (RO) terhadap jumlah RO yang dikelola oleh Satker. Nilai kinerja RO dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target RO.
- d. Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SP2D yang mengalami retur terhadap jumlah SP2D yang telah diterbitkan.



Pengukuran aspek efisiensi pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap ketepatan Satker dalam melakukan pembayaran atas beban DIPA. Indikator kinerja pada pengukuran aspek efisiensi pelaksanaan anggaran terdiri dari:

- a. Pengembalian/Kesalahan SPM, dihitung berdasarkan rasio antara pengembalian/kesalahan SPM oleh KPPN terhadap seluruh SPM yang diajukan KPPN terhadap seluruh SPM yang diajukan oleh Satker ke KPPN.
- b. Perencanaan Kas (Renkas), dihitung berdasarkan rasio antara Renkas/Rencana Penarikan Dana (RPD) Harian yang disampaikan secara tepat waktu terhadap kewajiban Renkas/RPD Harian yang diajukan ke KPPN.

Capaian SMART dilakukan dengan mengukur variabel-variabel sebagai berikut:

- a. capaian output, diukur dengan membandingkan antara realisasi volume RO dengan target volume RO.
- b. penyerapan anggaran, diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu dalam DIPA terakhir.
- c. Efisiensi, dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat capaian RO yang telah dicapai berdasarkan alokasi per target yang direncanakan.
- d. konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan.

Capaian IKU PKPA Kantor Wilayah DJKN Aceh adalah sebesar 97,55% dengan rincian Data Bobot dan Capaian IKPA (40%) dan Nilai Smart DJA (60%) sebagai berikut:

Indikator IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran		Capaian
A) Nilai IKPA		99,15%
1.	Revisi DIPA	10,00%
2.	Halaman III DIPA	9,38%
3.	Penyerapan Anggaran	20,00%
4.	Belanja Kontraktual	0,00%
5.	Penyelesaian Tagihan	0,00%
6.	Pengelolaan UP dan TUP	9,93%
7.	Dispensasi SPM	5,00%
8.	Capaian Output	25,00%
B) Nilai SMART		96,48%
Capaian Triwulan IV		97,55%



Dalam Indikator IKPA terdapat satu indikator yang tidak mendapat capaian sebesar 100% yaitu Halaman III DIPA dan Pengelolaan UP dan TUP. Hal ini antara lain disebabkan Pengelolaan TUP pada bulan Juni 2022 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan Kinerja TA 2022

No	Rincian Output	Postur Anggaran per 31 Desember 2022			
		Pagu	Realisasi Anggaran	Target Volume RO	Realisasi Volume RO
1	4796.BMB.001 Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	3.886.000	3.212.000	50	67
2	4796.BMB.002 Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang	13.629.000	13326000	100	195
3	4797.FAE.002 Rekomendasi atas Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi	8.400.000	8164000	1	2
4	4798.AAH.001 Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	16.491.000	15.850.000	4	10
5	4798.AAH.002 Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	31576.000	28.751.000	25	54
6	4798.AAH.003 Risalah Lelang				
7	4798.AAH.005 Risalah Lelang Sukarela UMKM (PU)				
8	4798.FAE.001 Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertifikatkan (PU)	340.750.000	314.080.484	3940	4271
9	4798.FAE.003 Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset				
10	4798.FAE.004 Rekomendasi Hasil Kajian Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)				
11	4798.FAE.006 Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	9.552.000	8.880.000	1	1
12	4798.FAE.007 Rekomendasi Hasil Penilaian	5.376.000	3.960.000	1	2
13	4798.FAE.009 Penggalan Potensi Lelang	12.960.000	10.807.000	1	3
14	4798.FAK.001 Aset BUN yang Dikelola	175.552.000	153.779.322	3	7
15	4801.AAH.002 Izin Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II				
16	4700.EBA.969 Layanan Bantuan Hukum	4.578.000	2.622.800	1	2
17	4701.EBA.002 Kerumahtanggaan	126.893.000	120.191.421	12	12
18	4701.EBA.994 Layanan Perkantoran	1.104.392.000	994.223.333	12	12
19	4701.EBB.001 Peralatan Fasilitas Perkantoran				
20	4701.EBB.003 Kendaraan Bermotor				
21	4701.EBB.004 Gedung/Bangunan				
22	4702.BMB.001 Pembinaan/Edukasi Publik	1500000	0	100	200
23	4702.BMB.002 Kehumasan	4.052.000	2.660.000	6	11
24	4702.BMB.003 Pameran/Eksibisi				
25	4704.EBA.001 Rekomendasi Kepatuhan Internal	7.680.000	3.744.000	5	7
TOTAL		1.867.267.000	1.684.251.360		

Dari daftar table di atas, terlihat bahwa anggaran telah direalisasikan sesuai dengan yang direncanakan untuk mencapai tujuan rincian output yang ditetapkan.

Tabel Simulasi Progress Capaian IKU

			Target 2022		Q1	Q2	Semester 1	Q3	s.d. Q3	s.d. Desember 2022	2022	
			Target Awal Tahun 2022	Target Adendum								
11	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	11a-CP	PM	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	Max/TLK								
			Karwil DUKN Aceh	95,5%	100,0%	94,97%	94,97%	98,98%	98,98%	97,56%	97,56%	
			Target kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%								
			Capaian IKU		100,0%	94,97%	94,97%	98,98%	98,98%	97,56%	97,56%	
			Data Untuk Keperluan Money Karwil Pada Tiap KPNL (Tidak Masuk Hitungan IKU)									
			KPNL Banda Aceh	95,5%	100%		100,00%	100,00%	100,00%	97,00%	97,00%	
			KPNL Lhokseumawe	95,5%	100%	100,00%	100,00%	98,01%	98,01%	98,01%	98,01%	

20. 12a-N Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan

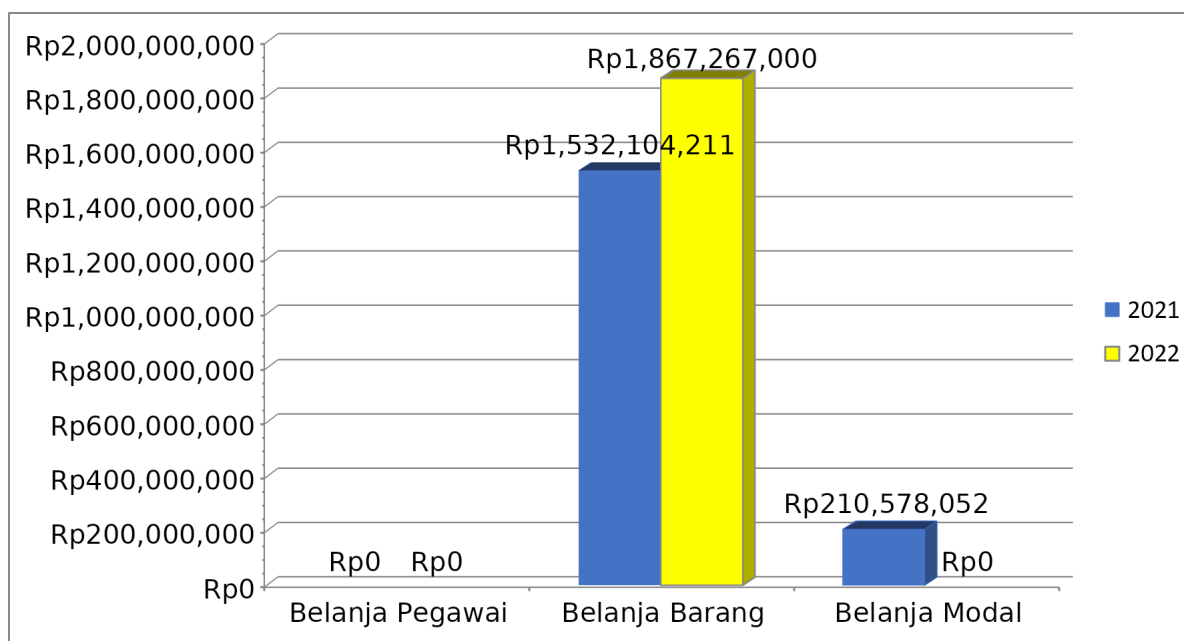
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	3,55	3,97	111,83%

B. Realisasi Anggaran

DIPA Kantor Wilayah DJKN Aceh pada tahun 2022 sebesar Rp1.867.267.000 dengan realisasi Rp1.684.251.360 atau sebesar 90,2% dari DIPA dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang	1.867.267.000	1.684.251.360
Belanja Modal	0	0

Grafik Perbandingan Realisasi realisasi penyerapan DIPA per-jenis belanja



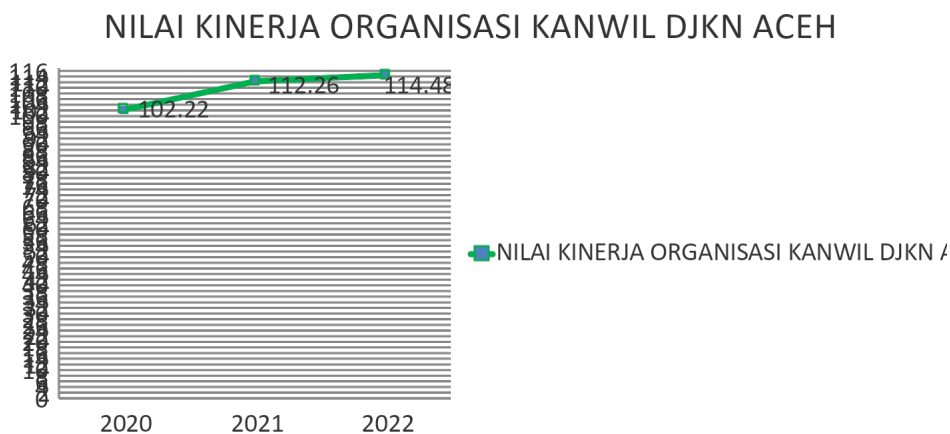
Jika di lihat dari grafik di atas, realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Barang TA 2021 terlihat lebih kecil dibandingkan TA 2022 hal ini disebabkan penerapan sentralisasi belanja pegawai DJKN sejak bulan Agustus 2020 sesuai Perdirjen Nomor 2/KN/2020 dan adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan berkurangnya pelaksanaan kegiatan yang melibatkan pihak eksternal serta pembatasan perjalanan dinas keluar kota bagi PNS. Adapun untuk Realisasi Belanja Modal TA 2022 tidak dianggarkan dalam DIPA sehingga sangat jauh berbeda dengan TA 2021.

BAB IV PENUTUP



Secara keseluruhan capaian kinerja atas 12 (dua belas) Sasaran Strategis yang dijabarkan dalam 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Kemenkeu *Two* Kanwil DJKN Tahun 2022 dapat tercapai dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 114,48%.

Gambar 4.1
Grafik Perbandingan NKO Kanwil DJKN Aceh



Dalam pencapaian target kinerja pada tahun 2022, Nilai Kinerja Organisasi Kanwil DJKN Aceh mengalami pertumbuhan positif dibandingkan dengan tahun 2021. Optimisme dan pengalaman dari tahun 2020 menjadikan Kanwil DJKN Aceh dapat menangani perubahan akibat pandemi covid -19 hingga tahun-tahun berikutnya menjadi lebih baik.

Sebagai unit vertikal yang berada di ujung barat Pulau Sumatera, Kanwil DJKN Aceh telah bekerja secara optimal, sehingga guna menghadapi tantangan pada tahun 2022, telah dibuat Rencana Aksi atau *action plan* dari masing-masing bidang/bagian umum, yaitu :

A. Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara

1. Sosialisasi kepada satuan kerja terkait peraturan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan, pengawasan dan pengendalian, pengamanan, penatausahaan, dan rekonsiliasi BMN;
2. Mengadakan *knowledge sharing* dan FGD terkait pengelolaan kekayaan negara;
3. Melaksanakan layanan konsultasi pengelolaan barang milik negara, dan bimbingan teknis aplikasi SIMAN, SIMANTAP dan SIMAK BMN;
4. Penggalan potensi nilai kekayaan negara yang diutilisasi dan potensi manfaat ekonomi melalui pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN;



B. Bidang Penilaian

1. Ekstensifikasi potensi SDM di bidang penilaian;
2. Peningkatan kapasitas Penilai dilakukan secara berkala;
3. Koordinasi bersama *stakeholders* potensial;
4. Pembebanan hasil *quality assurance* ke dalam IKU individu Penilai;
5. Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK dengan verifikasi dan menyusun DKPB.

C. Bidang Piutang Negara

1. Pembinaan kualitas SDM terkait administrasi pengurusan piutang negara;
2. Penyamaan persepsi mengenai kelengkapan dokumen penyerahan dan tata cara penyerahan;
3. Penggalan Potensi Piutang Negara dengan prioritas piutang BPJS ketenagakerjaan, dan Piutang pemerintah daerah secara lebih intensif;
4. Perbantuan SDM secara langsung berupa Penatausahaan BKPN serta Perbantuan/pendampingan dalam upaya penagihan langsung dan asistensi pengurusan piutang negara.

D. Bidang Lelang

1. Melaksanakan penggalan potensi lelang dan sosialisasi lelang;
2. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan lelang oleh pejabat lelang kelas I dan pejabat lelang kelas II dilingkup Kanwil DJKN Aceh;
3. Pengangkatan/pelantikan Pejabat Lelang Kelas II dan pemberian *reward* kepada Pejabat Lelang Kelas I atas kinerja;
4. Membangun database bidang lelang;
5. Pelaksanaan *in-house training* penyusunan laporan di bidang lelang;
6. Melaksanakan pemeriksaan risalah lelang, pemusnahan kertas sekuriti di KPKNL;
7. Pelaksanaan rapat kinerja setiap semester di bidang lelang;
8. Pengendalian dan pemantauan pelaksanaan lelang via e-auction.

E. Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi

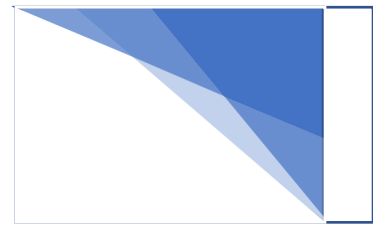
1. Mengadakan forum kinerja dilingkup Kanwil maupun KPKNL;
2. Mengembangkan kegiatan sinergi antar bidang menjadi kegiatan Kemenkeu Satu dengan menghadirkan pemateri dari seluruh Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Mengadakan *Forum Group Discussion* terkait manajemen risiko di lingkungan Kanwil DJKN Aceh;
4. Peningkatan kualitas pemberian pendapat hukum dan penanganan perkara.



F. Bagian Umum

1. Menugaskan pegawai sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi serta memperhatikan pemenuhan kompetensi pegawai;
2. Percepatan pelaksanaan program kegiatan segera setelah revisi anggaran disahkan;
3. Penajaman program dan kegiatan kerja;
4. Pemantauan secara berkala atas pelaksanaan paket pengadaan agar selesai tepat pada waktunya dan sesuai dengan kontrak.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJKN Aceh, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja tersebut harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi, sekaligus secara eksternal dapat menjadi indikator dalam menyesuaikan tuntutan stakeholder. Akhirnya, kita semua berharap Kanwil DJKN Aceh dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan memberikan pelayanan berdasarkan nilai-nilai Kementerian Keuangan.



**Kontrak Kinerja
& Pengukuran Kinerja
Kanwil DJKN Aceh 2022**





**KONTRAK KINERJA
NOMOR: 13/KN/2022
KEPALA KANTOR WILAYAH JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
ACEH
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022**

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Aceh, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2022



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH JENDERAL KEKAYAAN NEGARA ACEH
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
		1b-CP	Persentase produktivitas lelang	36%
		1c-N	Tingkat keberhasilan <i>joint program</i> pelaksanaan RCE dan pengembangan UMKM	80%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
		2b-CP	Persentase Penurunan <i>Outstanding Piutang Negara</i>	100%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	3a-N	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	4,55
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%
		4b-CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipatkan	100%
		4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
		4d-N	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%
6	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif	6a-N	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%
		6b-N	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10%
7	Edukasi yang Efektif	7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	92
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan Negara	85%
9	SDM yang Kompeten	9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
10	Organisasi yang <i>Fit For Purpose</i>	10a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBBM	85

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2022



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		10b-N Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	80
11	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	11a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%
12	Penguatan Tata Kelola Kehumasan dalam Ekosistem Kolaboratif	12a-N Indeks Efektivitas ekosistem kehumasan	3,55

No.	Program/Kegiatan	Anggaran
	Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	Rp 716.450.000
1.	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp 17.515.000
2.	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp 17.515.000
3.	Pengelolaan Aset	Rp 690.535.000
	Dukungan Manajemen	Rp 1.249.095.000
1.	Legislasi dan Litigasi	Rp 4.578.000
2.	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 1.231.285.000
3.	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp 5.552.000
4.	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp 7.680.000

Direktur Jenderal Kekayaan Negara



Ditandatangani Secara Elektronik
Ronald Silaban

Jakarta, 31 Januari 2022

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara



Ditandatangani Secara Elektronik
Syukriah HG

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2022



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR WILAYAH JENDERAL KEKAYAAN NEGARA ACEH
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							
1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	20%	25%	35%	30%	30%	36%	36%
1c-N	Tingkat keberhasilan <i>joint program</i> pelaksanaan RCE dan pengembangan UMKM	-	-	-	-	-	80%	80%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
2b-CP	Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi							
3a-N	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	-	-	-	-	-	4,55	4,55
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	50%	50%	55%	55%	65%	65%
4b-CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	20%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4d-N	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
6a-N	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2022



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6b-N	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
7	Edukasi yang Efektif							
7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	-	92	92	-	-	92	92
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							
8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	-	40%	40%	-	40%	85%	85%
9	SDM yang Kompeten							
9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
10	Organisasi yang <i>Fit For Purpose</i>							
10a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBBM	-	-	-	-	-	85	85
10b-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	-	-	-	-	-	80	80
11	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal							
11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	95,5 %	95,5 %	95,5 %	95,5 %	95,5%	95,5%
12	Penguatan Tata Kelola Kehumasan dalam Ekosistem Kolaboratif							
12a-N	Indeks Efektivitas ekosistem kehumasan	-	3,55	3,55	-	3,55	3,55	3,55

Jakarta, 31 Januari 2022

PNS yang dinilai,



Urutanoranganani Secara Elektronik
Syukriah HG

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2022



Sasaran Kerja Pegawai

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN
1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Syukriah HG	NAMA	Rionald Silaban
NIP	197004191996032001	NIP	196604231990101001
PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Utama Muda, IV/c	PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Utama, IV/e
JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Aceh	JABATAN	Direktur Jenderal Kekayaan Negara
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh	UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

NO	RENCANA KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
A. KINERJA UTAMA			
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
2	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	Persentase produktivitas lelang	36%
3	Peningkatan kontribusi kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian	Tingkat keberhasilan <i>joint program</i> pelaksanaan RCE dan pengembangan UMKM	80%
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
5	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase Penurunan <i>Outstanding Piutang Negara</i>	100%
6	Kepuasan Pengguna Layanan yang tinggi	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	4,55
7	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%
8	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	100%
9	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
10	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
11	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2022



NO (1)	RENCANA KINERJA (2)	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (3)	TARGET (4)
12	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%
13	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	Deviasi Data PNBFP Fungsional DJKN	10%
14	Edukasi yang Efektif	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	92
15	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%
16	SDM yang Kompeten	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
17	Organisasi yang <i>Fit For Purpose</i>	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM	85
18	Organisasi yang <i>Fit For Purpose</i>	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	80
19	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%
20	Penguatan Tata Kelola Kehumasan dalam Ekosistem Kolaboratif	Indeks Efektivitas ekosistem kehumasan	3,55

B. KINERJA TAMBAHAN

Pegawai yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Syukriah HG
NIP 197004191996032001

Jakarta, 31 Januari 2022

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik
Rionald Silaban
NIP 196604231990101001

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2022



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR WILAYAH JENDERAL KEKAYAAN NEGARA ACEH
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Anggaran
				Kegiatan	Output			
1	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Akuntabel dan Produktif/ Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Kompetisi Inovasi Manajer Aset (KOIN MAS) DJKN	Jumlah aset yang diberdayakan dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat	Q1: Inventarisasi terhadap aset yang akan diberdayakan/dimanfaatkan	Q1: Daftar Aset yang akan diberdayakan/dimanfaatkan	Q1 s.d. Q4	Bidang PKN	-
				Q2: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q2: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q3: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q3: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q4: Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Q4: Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan			

Jakarta, 31 Januari 2022
PNS yang dinilai,



UrutanCatangani Secara Elektronik
Syukriah HG

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2022

